



Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri

**Edisi Triwulan IV
Tahun 2012**



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri ini merupakan pelaksanaan amanat dari Pasal 77 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Laporan ini berisi informasi mengenai gambaran umum pelaksanaan pinjaman luar negeri, kinerja penyerapan, kinerja pelaksanaan pinjaman yang meliputi pencapaian output, status/permasalahan dan tindak lanjut, pemantauan lapangan, kinerja pelaksanaan hibah, evaluasi laporan proyek yang telah selesai serta diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Laporan ini diolah berdasarkan hasil (i) Rapat pemantauan triwulanan yang diselenggarakan di Bappenas, (ii) Laporan pelaksanaan kegiatan dari K/L selaku instansi penanggungjawab pinjaman luar negeri (penyerapan dana dan pencapaian output), (iii) Laporan dari pemberi pinjaman, (iv) informasi dari instansi terkait lainnya, serta (v) kunjungan lapangan.

Pada edisi Triwulan IV Tahun Anggaran 2012, total pinjaman yang dipantau pelaksanaannya berjumlah 190 pinjaman dengan nilai pinjaman sebesar USD 24.308,1 juta. Pinjaman tersebut berupa pinjaman program (*program loan*) sebanyak 3 pinjaman dengan nilai total sebesar USD 443,0 juta dan pinjaman proyek (*project loan*) sebanyak 187 pinjaman dengan nilai total sebesar USD 23.865,1 juta. Pinjaman proyek tersebut dilaksanakan melalui skema pinjaman lunak (*soft loan*) sebesar USD 17.853,4 juta dan kredit ekspor sebesar 6.011,7 juta. Dalam laporan ini pinjaman lunak (*soft loan*) didefinisikan sebagai pinjaman yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga maupun BUMN yang berasal dari kreditor multilateral maupun bilateral, sedangkan kredit ekspor merupakan pinjaman yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga dan BUMN yang berasal dari kreditor swasta asing maupun lembaga penjamin kredit ekspor.

Penarikan kumulatif pinjaman program mencapai USD 402,0 juta atau sebesar 90,7% dari nilai total pinjaman program, sedangkan penarikan kumulatif pinjaman proyek mencapai USD 10.372,2 juta atau sebesar 43,5% dari nilai total pinjaman proyek. Realisasi penarikan pinjaman proyek pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012 mencapai USD 1.904,3 juta atau sebesar 49,7% dari target yang direncanakan sebesar USD 3.834,1 juta. Dengan demikian terdapat kenaikan sebesar 21,3% dari realisasi Triwulan III TA 2012 yang baru mencapai 28,4%.

Disamping realisasi penarikan pinjaman, dilakukan juga pemantauan terhadap kinerja pelaksanaan pinjaman proyek melalui pencapaian indikator output dan pengukuran progres varian. Pencapaian indikator output dilakukan berdasarkan rencana pencapaian indikator output yang telah dirumuskan oleh Kementerian/Lembaga penanggung jawab kegiatan dalam pernyataan kinerja. Dalam laporan ditampilkan 6 proyek yang dilakukan pemantauan terhadap

pencapaian outputnya, sedangkan angka *progres varian* adalah selisih antara persentase penarikan kumulatif dengan persentase waktu terpakai sejak pinjaman tersebut efektif. Angka *progres varian* yang lebih kecil dari minus 30 mengindikasikan bahwa suatu proyek mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan (*serious delay*).

Penyempurnaan laporan terus dilakukan, dalam edisi ini laporan atas pencapaian output disajikan lebih ringkas agar lebih mudah dipahami. Selain itu, telah ditambahkan laporan kinerja pelaksanaan hibah luar negeri dan laporan atas beberapa pelaksanaan proyek yang telah selesai dilaksanakan.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2012.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas

Armida S. Alisjahbana

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vii
BAB 1 Gambaran Umum Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri..	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman...	4
1.3 Komposisi Pinjaman Proyek Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab.....	7
BAB 2 Kinerja Pelaksanaan Pinjaman Proyek.....	10
2.1 Kinerja Pencapaian Output	10
2.1.1 Pinjaman Bank Dunia 4205-IND <i>Early Childhood Education and Development</i>	10
2.1.2 Pinjaman Bank Dunia 4789-IND <i>Managing Higher Education for Relevance and Efficiency Project</i>	12
2.1.3 Pinjaman ADB 2285-INO <i>Sustainable Aquaculture Development For Food Security And Poverty Reduction (SAFVER)</i>	14
2.1.4 Pinjaman ADB 2416-INO <i>Indonesia Vocational Education Strengthening (INVEST)</i>	16
2.1.5 Pinjaman JICA IP-542 <i>Utilization Project for Educational Quality Enhancement in Yogyakarta Province</i>	17
2.1.6 Pinjaman JICA IP-550 <i>Denpasar Sewerage Development II</i>	18
2.2 Progres Varian.....	19
BAB 3 Pemantauan Lapangan	22
3.1. Pinjaman Bank Dunia 4260-IND <i>Farmer Empowerment Through Agriculture Technology and Information (FEATI)</i>	22
3.2 Pinjaman IFAD 645-ID <i>Rural Empowerment and Agriculture Development Programme in Central Sulawesi</i>	25
3.3 Pinjaman Bank Dunia 4789-IND <i>Managing Higher Education for Relevance and Efficiency</i>	27
3.4 Pinjaman JICA IP-553 <i>Development of Bandung Institute of Technology (III)</i>	28
3.5 Pinjaman ADB 2416-INO <i>Vocational Education Strengthening Project</i>	29

BAB 4 Kinerja Pelaksanaan Hibah Luar Negeri.....	31
4.1 Hibah Bank Dunia <i>Support to BPK for Preparation of New Strategic Plan Project</i>	31
4.2 Hibah Bank Dunia <i>Extractive Industries Transparency Initiative</i>	33
4.3 Hibah Bank Dunia <i>Extending Telecommunication in Rural Indonesia</i>	34
4.4 Hibah ADB <i>Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program-Citarum Watershed Management and Biodiversity Conservation</i>	36
 BAB 5 Laporan Pelaksanaan Proyek Yang Telah Selesai	 38
5.1 PCR Pinjaman ADB 1964-INO <i>Sustainable Capacity Building for Decentralization Project</i>	38
5.2 PCR Pinjaman Jerman No.2004 66 383 <i>Improvement of The Dr. Wahidin Sudirohusodo Hospital, Makassar</i>	42
 BAB 6 Penutup.....	 44
6.1 Kesimpulan.....	44
6.2 Saran.....	45
 Daftar Istilah

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 1	Rekapitulasi Penyerapan Pinjaman Luar Negeri Posisi 31 Desember 2012	1
Tabel 2	Perbandingan Realisasi Penyerapan Pinjaman Luar Negeri TA 2011 dan TA 2012.....	2
Tabel 3	Realisasi Penyerapan Pinjaman Proyek Posisi 31 Desember 2012.....	2
Tabel 4	Perbandingan Realisasi Penyerapan Pinjaman Proyek TA 2011 dan TA 2012.....	3
Tabel 5	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Proyek Berdasarkan Sumber Pinjaman Posisi 31 Desember 2012.....	6
Tabel 6	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Proyek Menurut Instansi Penanggung Jawab.....	8
Tabel 7	Gambaran Umum Pinjaman Bank Dunia 4205-IND <i>Early Childhood Education and Development Project</i>	10
Tabel 8	Pencapaian Indikator Kinerja Output Pinjaman 4205-IND <i>Early Childhood Education and Development</i>	12
Tabel 9	Gambaran Umum Pinjaman Bank Dunia 4789-IND <i>Managing Higher Education for Relevance and Efficiency Project</i>	13
Tabel 10	Pencapaian Indikator Kinerja Output Pinjaman 4789-IND <i>Managing Higher Education for Relevance and Efficiency Project</i> (IMHERE)	13
Tabel 11	Gambaran Umum Pinjaman ADB 2285-INO <i>Sustainable Aquaculture Development For Food Security And Poverty Reduction</i> (SAFVER) ...	14
Tabel 12	Pencapaian Indikator Kinerja Output Pinjaman 2285-INO <i>Sustainable Aquaculture Development For Food Security And Poverty Reduction</i> (SAFVER).....	15
Tabel 13	Gambaran Umum Pinjaman ADB 2416-INO <i>Indonesia Vocational Education Strengthening</i>	16
Tabel 14	Pencapaian Indikator Kinerja Output Pinjaman 2416-INO <i>Indonesia Vocational Education Strengthening</i>	17
Tabel 15	Gambaran Umum Pinjaman JICA IP-542 <i>ICT Utilization Project for Educational Quality Enhancement in Yogyakarta Province</i>	17
Tabel 16	Pencapaian Indikator Kinerja Output Loan IP-542 <i>ICT Utilization Project for Educational Quality Enhancement in Yogyakarta Province</i>	18
Tabel 17	Gambaran Umum Pinjaman JICA IP-550 <i>Denpasar Sewerage Development Project II</i>	19
Tabel 18	Pencapaian Indikator Kinerja Output Loan IP-550 <i>Denpasar Sewerage Development Project II</i>	19

Tabel 19	Pinjaman Proyek Dengan Progres Varian \leq -30	17
Tabel 20	Gambaran Umum Pinjaman Bank Dunia 4260-IND <i>Farmer Empowerment through Agriculture Technology and Information</i>	22
Tabel 21	Gambaran Umum Pinjaman IFAD 645-ID <i>Rural Empowerment and Agriculture Development</i>	25
Tabel 22	Gambaran Umum Pinjaman Bank Dunia 4789-IND <i>Managing Higher Education for Relevance and Efficiency Project</i>	27
Tabel 23	Gambaran Umum Pinjaman JICA IP-553 <i>Development of Bandung Institute of Technology III</i>	28
Tabel 24	Gambaran Umum Pinjaman ADB 2416-INO <i>Indonesia Vocational Education Strengthening (INVEST)</i>	29
Tabel 25	Gambaran Umum Hibah Bank Dunia <i>Support to BPK for Preparation of New Strategic Plan Project</i>	31
Tabel 26	Gambaran Umum Hibah Bank Dunia <i>Extractive Industries Transparency Initiative</i>	33
Tabel 27	Gambaran Umum Hibah Bank Dunia <i>Extending Telecommunication in Rural Indonesia</i>	34
Tabel 28	Gambaran Umum Hibah ADB <i>Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program-Citarum Watershed Management and Biodiversity Conservation</i>	36
Tabel 29	Gambaran Umum Pinjaman ADB 1964-INO <i>Sustainable Capacity Building for Decentralization Project</i>	38
Tabel 30	Keluaran dari Pengembangan dan Pelaksanaan <i>Capacity Building Action Plan (CBAP)</i>	39
Tabel 31	Gambaran Umum Pinjaman Jerman No. 2004 66 383 <i>Improvement of Dr. Wahidin Sudirohusodo Hospital, Makassar</i>	42
Tabel 32	Rincian Komponen Pinjaman Jerman No. 2004 66 383 <i>Improvement of Dr. Wahidin Sudirohusodo Hospital, Makassar</i>	42

DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar 1	Persentase Realisasi Penyerapan Pinjaman Proyek Tahun Anggaran 2007 s.d. 2012	4
Gambar 2	Komposisi Nilai Pinjaman Proyek Berdasarkan Sumber Pinjaman Posisi 31 Desember 2012	5
Gambar 3	Persentase Realisasi Penyerapan Kumulatif Pinjaman Proyek Berdasarkan Sumber Pinjaman Posisi 31 Desember 2012.....	6
Gambar 4	Persentase Realisasi Penyerapan Kumulatif Pinjaman Proyek Tahun Anggaran 2012 Berdasarkan Sumber Pinjaman Posisi 31 Desember 2012.....	6
Gambar 5	Komposisi Pinjaman Proyek Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab Posisi 31 Desember 2012	7
Gambar 6	Persentase Realisasi Penyerapan Kumulatif Pinjaman Proyek Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab Posisi 31 Desember 2012.....	9
Gambar 7	Persentase Realisasi Penyerapan Kumulatif Pinjaman Proyek Tahun Anggaran 2012 Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab Posisi 31 Desember 2012	9

BAB I

Gambaran Umum Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri

1.1. Pendahuluan

Pinjaman luar negeri yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran (TA) 2012 berjumlah 190 pinjaman dengan nilai sebesar USD 24.308,1 juta. Penyerapan kumulatif pinjaman luar negeri sampai dengan Triwulan IV TA 2012 mencapai USD 10.774,2 juta atau 44,3% dari total nilai pinjaman, sehingga sisa nilai pinjaman yang belum ditarik adalah sebesar USD 13.533,9 juta atau 55,7% dari total nilai pinjaman. Realisasi penyerapan pinjaman pada tahun anggaran berjalan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012 mencapai USD 2.306,3 juta¹ atau 53,9% dari target penarikan TA 2012 sebesar USD 4.277,1 juta².

Tabel 1. Rekapitulasi Penyerapan Pinjaman Luar Negeri Posisi 31 Desember 2012

(dalam juta USD)

No.	Pinjaman	Jumlah Pinjaman	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif		Pinjaman belum ditarik	TA 2012		
				Jumlah	%		Target	Realisasi	%
1.	Pinjaman Program	3	443,0	402,0	90,7	41,0	443,0	402,0	90,7
2.	Pinjaman Proyek	187	23.865,1	10.372,2	43,5	13.492,9	3.834,1	1.904,3	49,7
Total		190	24.308,1	10.774,2	44,3	13.533,9	4.277,1	2.306,3	53,9

Sumber : Bappenas, Lampiran LKPPHLN Edisi Triwulan IV Tahun 2012 (diolah)

Pinjaman luar negeri dapat dibedakan menjadi pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Pinjaman tunai yang dipantau pelaksanaannya berupa pinjaman program, sedangkan untuk pinjaman kegiatan berupa pinjaman proyek.

Pinjaman program yang sedang berjalan berjumlah 3 pinjaman dengan nilai sebesar USD 443,0 juta. Penyerapan kumulatifnya mencapai USD 402,0 juta atau 90,7% dari nilai total pinjaman. Realisasi penyerapan pinjaman di TA 2012 mencapai USD 402,0 juta atau 90,7% dari target penarikan TA 2012.

Untuk pinjaman proyek, terdapat 187 pinjaman yang dipantau pelaksanaannya dengan nilai pinjaman sebesar USD 23.865,1 juta. Penyerapan kumulatifnya mencapai USD 10.372,2 juta atau 43,5% dari nilai total pinjaman. Realisasi penyerapan pinjaman di TA 2012 mencapai USD 1.904,3 juta atau 49,7% dari target penarikan TA 2012.

¹ Realisasi penyerapan pinjaman luar negeri bersumber dari data *development partners (lender)* dan *executing agency* per 31 Desember 2012.

² Berdasarkan DIPA TA 2012.

Realisasi penyerapan pinjaman terhadap target tahun anggaran 2012 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapan pinjaman pada tahun anggaran 2011. Realisasi penyerapan pinjaman pada TA 2011 mencapai 69,0% dari target berbanding 53,9% dari target di TA 2012 seperti dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Realisasi Penyerapan Pinjaman Luar Negeri TA 2011 dan TA 2012

(dalam juta USD)

No.	Pinjaman	Target 2011	Realisasi TW IV TA 2011	%	Target 2012	Realisasi TW IV TA 2012	%
1.	Pinjaman Program	506,8	506,8	100,0	443,0	402,0	90,7
2.	Pinjaman Proyek	4.198,8	2.741,9	65,3	3.834,1	1.904,3	49,7
TOTAL		4.705,5	3.248,8	69,0	4.277,1	2.306,3	53,9

Sumber : Bappenas, Lampiran LKPPHLN Edisi Triwulan IV Tahun 2011 dan Lampiran LKPPHLN Edisi Triwulan IV Tahun 2012 (diolah).

Pada TA 2012 terdapat 187 pinjaman proyek dengan total nilai pinjaman sebesar USD 23.865,1 juta. Pinjaman proyek tersebut dilaksanakan melalui skema pinjaman lunak (*soft loan*) dan pinjaman kredit ekspor. Pinjaman lunak (*soft loan*) merupakan pinjaman yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga maupun BUMN yang berasal dari kreditor multilateral maupun bilateral yang proses perundingan perjanjiannya dilakukan sebelum pengadaan barang/jasa dilaksanakan. Sedangkan kredit ekspor disini merupakan pinjaman yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga dan BUMN yang berasal dari kreditor swasta asing maupun lembaga penjamin kredit ekspor yang proses perundingannya dilakukan secara bersamaan atau setelah kontrak pengadaan barang/jasa. yang Dari skema pinjaman tersebut ada yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan diteruskan kepada BUMN dengan *Subsidiary Loan Agreement* (di-SLA-kan). Realisasi dari pinjaman proyek tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Realisasi Penyerapan Pinjaman Proyek Luar Negeri Posisi 31 Desember 2012

(dalam juta USD)

No.	Pinjaman Proyek	Jumlah Pinjaman	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif		Pinjaman belum ditarik	TA 2012		
				Jumlah	%		Target	Realisasi	%
1.	Soft Loan	151	17.853,4	9.104,7	51,0	8.748,7	2.414,9	1.454,7	60,2
	- Dilaksanakan KL	124	11.726,5	6.181,7	52,7	5.544,9	1.810,0	1.093,8	60,4
	- Di-SLA-kan	27	6.126,9	2.923,1	47,7	3.203,9	605,0	360,9	59,7
2.	Kredit Ekspor	36	6.011,7	1.267,5	21,1	4.744,2	1.419,2	449,6	31,7
	- Dilaksanakan KL	30	5.630,6	1.003,8	17,8	4.626,9	1.348,9	400,5	29,7
	- Di-SLA-kan	6	381,1	263,7	69,2	117,4	70,3	49,1	69,8
Total		187	23.865,1	10.372,2	43,5	13.492,9	3.834,1	1.904,3	49,7

Sumber : Bappenas, Lampiran LKPPHLN Edisi Triwulan IV Tahun 2012 (diolah).

Pinjaman proyek yang dilaksanakan dengan skema pinjaman lunak (*soft loan*) sampai dengan Triwulan IV TA 2012 berjumlah 151 proyek dengan nilai pinjaman sebesar USD 17.853,4 juta. Pada triwulan ini terdapat 2 pinjaman proyek yang baru dipantau pelaksanaannya dengan nilai sebesar USD 183,9 juta. Pinjaman tersebut berasal dari Bank Dunia dan Korea. Penyerapan kumulatif pinjaman lunak sampai dengan Triwulan IV TA 2012 mencapai USD 9.104,7 juta (51,0%), sehingga dana pinjaman lunak (*soft loan*) yang belum ditarik berjumlah USD 8.748,7 juta (49,0%). Realisasi penyerapan dana pinjaman lunak pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012 mencapai sebesar USD 1.454,7 juta atau 60,2% dari target yang direncanakan yaitu sebesar USD 2.414,9 juta.

Dari 151 pinjaman proyek yang dilaksanakan melalui skema *soft loan* tersebut, sebanyak 124 pinjaman dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan 27 pinjaman diteruspinjamkan (di-SLA-kan) kepada BUMN. Dari 124 pinjaman yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, penyerapan kumulatifnya sudah mencapai USD 6.181,7 juta atau 52,7% dari nilai pinjaman sebesar USD 11.726,5 juta. Penyerapan pada TA 2012 mencapai USD 1.093,8 juta atau 60,4% dari target sebesar USD 1.810,0 juta. Sedangkan untuk pinjaman yang diteruspinjamkan (di-SLA-kan), penyerapan kumulatif mencapai USD 2.923,1 juta atau 47,7% dari nilai pinjaman sebesar USD 6.126,79 juta.

Pinjaman proyek yang dilaksanakan melalui skema kredit ekspor berjumlah 36 proyek dengan nilai pinjaman sebesar USD 6.011,7 juta. Dari Tabel 3 terlihat bahwa penyerapan kumulatif pinjaman kredit ekspor sampai dengan Triwulan IV TA 2012 mencapai USD 1.267,5 juta atau 21,1% dari nilai pinjaman, sehingga dana pinjaman kredit ekspor yang belum ditarik berjumlah USD 4.744,2 juta. Realisasi penyerapan dana pinjaman kredit ekspor pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012 mencapai USD 449,6 juta atau 31,7% dari target yang direncanakan yaitu sebesar USD 1.419,2 juta.

Dari 36 pinjaman proyek yang dilaksanakan melalui skema kredit ekspor, sebanyak 30 pinjaman dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan 6 pinjaman diteruspinjamkan (di-SLA-kan) kepada BUMN. Dari 30 pinjaman yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, penyerapan kumulatifnya mencapai USD 1.003,8 juta atau 17,8% dari nilai pinjaman sebesar USD 5.630,6 juta. Penyerapan pada TA 2012 mencapai USD 400,5 juta atau 29,7% dari target sebesar USD 1.348,9 juta. Sedangkan untuk pinjaman yang diteruspinjamkan (di-SLA-kan), penyerapan kumulatif mencapai USD 263,7 juta atau 69,2% dari nilai pinjaman sebesar USD 381,1 juta.

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Penyerapan Pinjaman Proyek Luar Negeri TA 2011 dan TA 2012

(dalam juta USD)

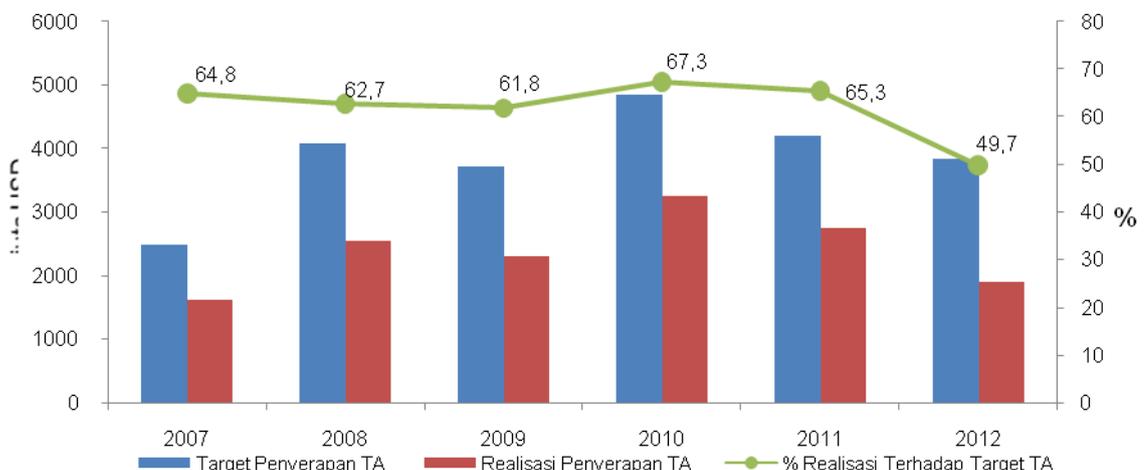
No.	Pinjaman Proyek	Target 2011	Realisasi TW IV TA 2011	%	Target 2012	Realisasi TW IV TA 2012	%
1.	Soft Loan	3.288,9	2.023,2	61,5	2.414,9	1.454,7	60,2
	- Dilaksanakan K/L	2.391,0	1.667,4	69,7	1.810,0	1.093,8	60,4
	- Di-SLA-kan	897,9	355,8	39,6	605,0	360,9	59,7
2.	Kredit Ekspor	909,9	718,7	79,0	1.419,2	449,6	31,7
	- Dilaksanakan K/L	782,3	647,6	82,8	1.348,9	400,5	29,7
	- Di-SLA-kan	127,6	71,1	55,7	70,3	49,1	69,8
TOTAL		4.198,8	2.742,0	65,3	3.834,1	1.904,3	49,7

Sumber : Bappenas, Lampiran LKPPHLN Edisi Triwulan IV Tahun 2012 (diolah).

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa penyerapan untuk TA 2012 pada skema pendanaan kredit ekspor masih rendah, khususnya yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Selain itu, apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama pada TA 2011, kinerja penyerapan pinjaman proyek yang dilaksanakan melalui skema kredit ekspor mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya kendala dalam pelaksanaan proyek. Kendala-kendala tersebut antara lain karena masih berjalannya beberapa proses tender dan negosiasi teknis serta masih adanya proses negosiasi *agreement* pada proyek-proyek di Kementerian Pertahanan. Selain itu, target penarikan untuk proyek-proyek kredit ekspor yang berada di Kementerian Pertahanan dan POLRI menggunakan angka proyeksi yang bersumber dari alokasi kredit ekspor. Sebagaimana terlihat pada Tabel 4, target penarikan di tahun 2012 ini meningkat cukup besar.

Gambaran realisasi penyerapan pinjaman proyek terhadap target tahun anggaran untuk periode tahun 2007 sampai tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini. Realisasi penyerapan pinjaman proyek terhadap target tahun anggaran 2012 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 1. Realisasi Penyerapan Pinjaman Proyek Luar Negeri Tahun Anggaran 2007 s.d. 2012

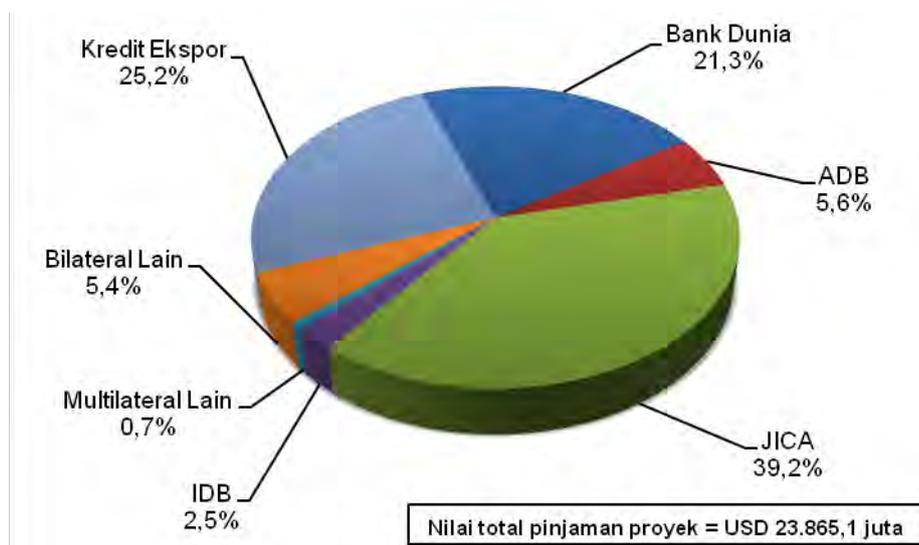


1.2. Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman

Pelaksanaan pinjaman luar negeri dapat dilihat berdasarkan sumber pinjaman. Berdasarkan sumbernya, pinjaman luar negeri berasal dari kreditor multilateral, kreditor bilateral, kreditor swasta asing dan lembaga penjamin kredit ekspor. Kreditor multilateral terdiri dari *World Bank* atau Bank Dunia, *Asian Development Bank* (ADB), *Islamic Development Bank* (IDB), *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) dan *Saudi Fund*. Kelompok kreditor bilateral terdiri dari *Japan International Cooperation Agency* (JICA), Australia, Belanda, China, Denmark, Jerman, Korea, Perancis dan Spanyol. Dalam laporan ini, kriteria sumber pinjaman dibagi menjadi 7 kelompok besar dengan mempertimbangkan nilai pinjaman dan jumlah pinjaman dari masing-masing kreditor tersebut. Ketujuh kelompok sumber pinjaman tersebut adalah Bank Dunia, ADB, JICA, IDB, Multilateral Lain (terdiri dari IFAD dan Saudi Fund) dan Bilateral Lain (terdiri dari Australia, Belanda, China, Denmark, Jerman, Korea, Perancis dan Spanyol), serta kredit ekspor yang terdiri dari kreditor swasta asing dan lembaga penjamin kredit ekspor.

Berdasarkan komposisinya, terdapat 3 pinjaman program yang bernilai USD 443,0 dan seluruhnya berasal dari 1 kreditor multilateral, yaitu Bank Dunia. Untuk pinjaman proyek terdapat 187 pinjaman dengan nilai USD 23.865,1 juta yang berasal dari berbagai kreditor dengan komposisi nilai pinjaman sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Komposisi Pinjaman Proyek Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman Posisi 31 Desember 2012



Dari nilai pinjaman proyek sebesar USD 23.865,1 juta; komposisi pinjaman proyek terbesar berasal dari JICA sebesar 39,2% diikuti oleh pinjaman yang berasal dari Kredit Ekspor (25,2%) dan Bank Dunia (21,3%), Bilateral Lain (5,4%), IDB (2,5%) dan Multilateral Lain (0,7%).

Kinerja pelaksanaan pinjaman proyek luar negeri berdasarkan sumber pinjamannya dapat dilihat lebih lengkap pada Tabel 5. Tabel tersebut memperlihatkan jumlah pinjaman, nilai pinjaman dan penyerapan secara kumulatif maupun tahun anggaran dari masing-masing sumber pinjaman.

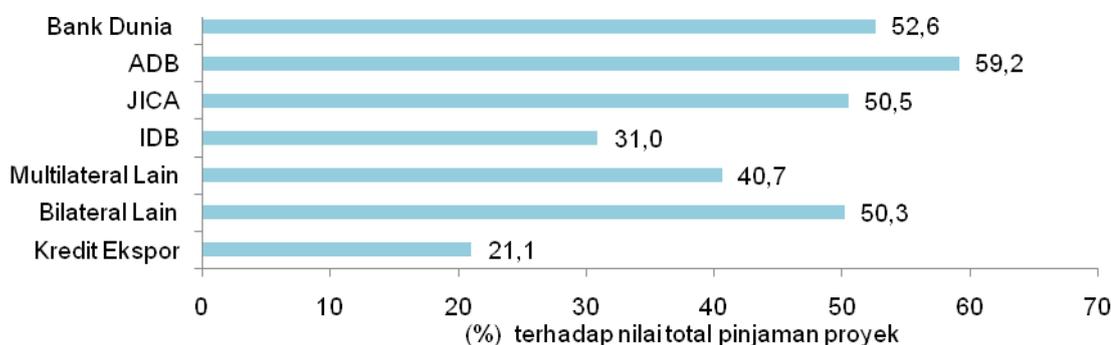
Tabel 5. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Proyek Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman Posisi 31 Desember 2012

No.	Sumber Pinjaman	Jumlah Pinjaman	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	TA 2012		
				Jumlah	%		Target	Realisasi	%
1.	Bank Dunia	30	5.078,9	2.673,2	52,6	2.405,7	557,3	323,7	58,1
2.	ADB	21	1.334,6	790,0	59,2	544,6	277,5	198,6	71,6
3.	JICA	49	9.363,5	4.731,3	50,5	4.632,2	1.088,4	621,0	57,1
4.	IDB	26	607,7	188,2	31,0	419,5	168,0	96,4	57,4
5.	Multilateral Lain	4	169,5	68,9	40,7	100,6	11,2	5,1	45,7
6.	Bilateral Lain	21	1.299,2	653,2	50,3	646,1	312,5	209,9	67,2
7.	Kredit Ekspor	36	6.011,7	1.267,5	21,1	4.744,2	1.419,2	449,6	31,7
Total		187	23.865,1	10.372,2	43,5	13.492,9	3.834,1	1.904,3	49,7

Sumber : Bappenas, Lampiran LKPPHLN Edisi Triwulan IV Tahun 2012 (diolah).

Jumlah pinjaman terbanyak berasal dari pinjaman JICA, diikuti oleh Kredit Ekspor, Bank Dunia, IDB, ADB, Bilateral Lain dan Multilateral Lain. Untuk realisasi penyerapan, persentase penyerapan kumulatif tertinggi dicapai oleh ADB yang mencapai 59,2%, diikuti oleh Bank Dunia (52,6%), JICA (50,5%), Bilateral Lain (50,3%) dan Multilateral Lain (40,7%). Sementara realisasi penyerapan kumulatif untuk pinjaman yang bersumber dari IDB dan Kredit Ekspor masing-masing mencapai 31,0% dan 21,1%. Gambaran lebih ringkas mengenai kinerja penyerapan kumulatif berdasarkan sumber pinjaman diperlihatkan pada Gambar 3.

Gambar 3. Persentase Realisasi Penyerapan Kumulatif Pinjaman Proyek Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman Posisi 31 Desember 2012

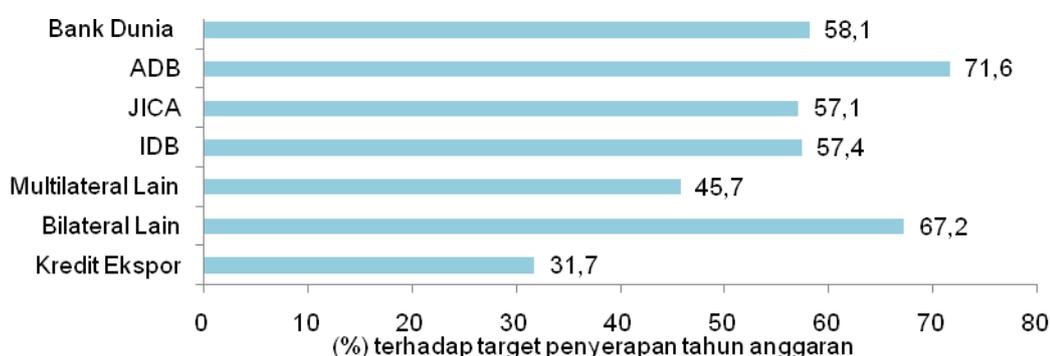


Penyerapan kumulatif pinjaman yang didanai IDB sampai dengan 31 Desember 2012 mencapai 31,0%. Penyerapan ini meningkat cukup signifikan bila dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya yang penyerapan kumulatifnya hanya mencapai 17,2%. Untuk pinjaman yang bersumber dari Kredit Ekspor, persentase

penyerapan baru mencapai 21,1%. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, kenaikannya tidak terlalu signifikan.

Gambar 4 memperlihatkan secara ringkas realisasi penyerapan pinjaman proyek terhadap target penyerapan pada Tahun Anggaran 2012. Dari gambar tersebut diperlihatkan bahwa realisasi penyerapan tertinggi berada di pinjaman yang bersumber dari ADB yang mencapai 71,6% diikuti oleh Bilateral Lain (67,2%), Bank Dunia (58,1%), IDB (57,4%), JICA (57,1%), Multilateral Lain (45,7%) dan Kredit Ekspor (31,7%). Realisasi penyerapan pada pinjaman IDB cukup tinggi, walaupun secara kumulatif penyerapannya masih berada dibawah pinjaman lainnya.

Gambar 4. Persentase Realisasi Penyerapan Pinjaman Proyek Luar Negeri Tahun Anggaran 2012 Berdasarkan Sumber Pinjaman



1.3. Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

Pada Triwulan IV TA 2012 tercatat 23 Kementerian/ Lembaga/ BUMN yang menjadi instansi penanggung jawab (*Executing Agency*) atas 190 pinjaman luar negeri yang sedang berjalan. Untuk pinjaman program, dari 3 pinjaman yang bernilai USD 443,0 juta, seluruhnya seluruhnya dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Untuk pinjaman proyek, terdapat 23 instansi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan 187 pinjaman yang bernilai USD 23.865,2 juta. Pinjaman tersebut ada yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan ada pula yang dilaksanakan oleh BUMN melalui perjanjian peneruspinjaman (*Subsidiary Loan Agreement*).

Gambar 5. Komposisi Pinjaman Proyek Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab Posisi 31 Desember 2012



Sebagian besar pinjaman proyek tersebut dilaksanakan oleh 6 instansi penanggungjawab, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, PT. PLN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Komposisi nilai pinjaman dari masing-masing instansi penanggungjawab dapat dilihat pada Gambar 5. Dari *pie chart* tersebut dapat dilihat bahwa 85,0% nilai pinjaman menjadi tanggungjawab 6 instansi. Kementerian Pekerjaan Umum menjadi instansi yang memiliki pinjaman terbesar, diikuti oleh PT. PLN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sisanya sebesar 15,0% dilaksanakan oleh 17 instansi lainnya.

Tabel 6. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Proyek Luar Negeri Menurut Instansi Penanggung Jawab Posisi 31 Desember 2012

(dalam juta USD)

No.	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Pinjaman	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	TA 2012		
				Jumlah	%		Target	Realisasi	%
A.	Kementerian/Lembaga	154	17.357,1	7.185,4	41,4	10.171,7	3.158,8	1.494,3	47,3
1.	Kementerian Dalam Negeri	3	1.381,0	1.256,5	91,0	124,5	127,9	86,4	67,6
2.	Kementerian Pertahanan	26	5.024,0	820,2	16,3	4.203,8	1.215,4	357,1	29,4
3.	Kementerian Keuangan	2	170,0	26,5	15,6	143,5	24,1	0,9	3,7
4.	Kementerian Pertanian	5	257,9	116,8	45,3	141,0	20,7	14,8	71,5
5.	Kementerian Perhubungan	16	2.151,0	604,3	28,1	1.546,7	317,2	151,4	47,7
6.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	23	1.002,0	430,8	43,0	571,2	236,2	111,8	47,3
7.	Kementerian Kesehatan	9	296,8	193,7	65,3	103,1	53,5	38,1	71,2
8.	Kementerian Agama	8	179,3	109,1	60,9	70,2	33,7	18,9	55,9
9.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	4	138,0	73,7	53,4	64,3	38,5	22,5	58,4
10.	Kementerian Pekerjaan Umum	44	5.550,7	3.086,0	55,6	2.464,7	845,2	588,3	69,6
11.	Badan Pusat Statistik	1	65,0	0,0	0,0	65,0	9,8	0,0	0,0
12.	Bappenas	3	252,8	91,1	36,0	161,7	31,8	16,4	51,7
13.	Kementerian Kominfo	1	33,7	12,5	37,2	21,2	10,2	5,5	54,2
14.	Kepolisian Republik Indonesia	4	606,6	183,6	30,3	423,0	133,4	43,3	32,5
15.	Lemhanas	1	9,8	9,8	100,0	0,0	5,3	5,3	100,0
16.	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	1	105,2	103,8	98,7	1,4	1,4	0,0	0,0
17.	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	1	40,1	7,6	18,9	32,5	19,5	7,6	38,9
18.	LIPi	1	19,5	12,4	63,5	7,1	11,6	5,7	49,0
19.	Bakosurtanal	1	73,8	47,0	63,7	26,8	23,3	20,2	86,5
B.	BUMN	33	6.508,0	3.186,8	49,0	3.321,2	675,3	410,0	60,7
20.	PT. PLN	27	5.183,1	2.479,6	47,8	2.703,5	551,0	319,8	58,1
21.	PT. PGN	2	637,7	623,8	97,8	14,0	6,9	6,7	98,3
22.	PT. Pertamina	2	487,2	2,3	0,5	484,9	7,0	2,3	33,3
23.	PT. Sarana Multi Infrastruktur	2	200,0	81,1	40,6	118,9	110,5	81,1	73,4
Total		187	23.865,1	10.372,2	43,5	13.492,9	3.834,1	1.904,3	49,7

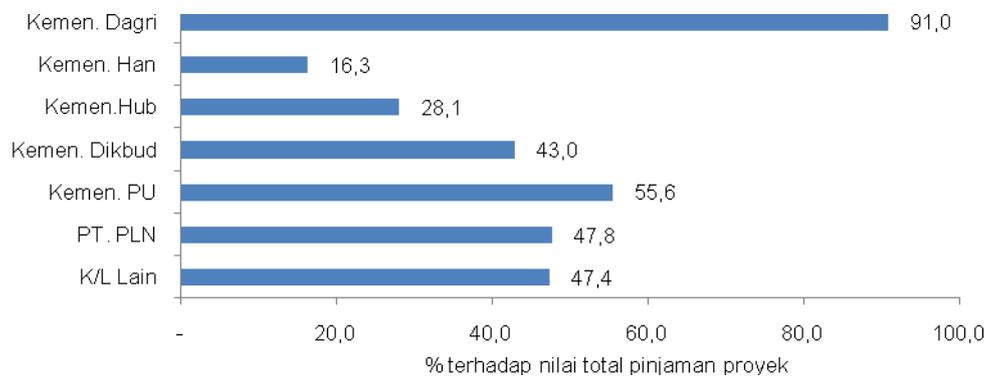
Sumber : Bappenas, Lampiran LKPPHLN Edisi Triwulan IV Tahun 2012 (diolah).

Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa dari total 187 pinjaman proyek, sebanyak 154 pinjaman dilaksanakan oleh 19 Kementerian/Lembaga. Nilai pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga mencapai USD 17.357,1 juta dengan penyerapan kumulatifnya mencapai USD 7.185,4 juta atau 41,4% dari total nilai pinjaman. Realisasi penyerapan pada TA 2012 mencapai USD 1.494,3 juta atau 47,3% dari target penyerapan sebesar USD 3.158,8 juta.

Selain dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, terdapat 33 pinjaman yang diteruspinjamkan dan dilaksanakan oleh 4 BUMN. Nilai pinjamannya mencapai USD 6.508,0 juta dengan penyerapan kumulatif mencapai USD 3.186,8 juta atau 49,0% dari total nilai pinjaman. Realisasi penyerapan pada TA 2012 mencapai USD 410,0 juta atau 60,7% dari target penyerapan sebesar USD 675,3 juta.

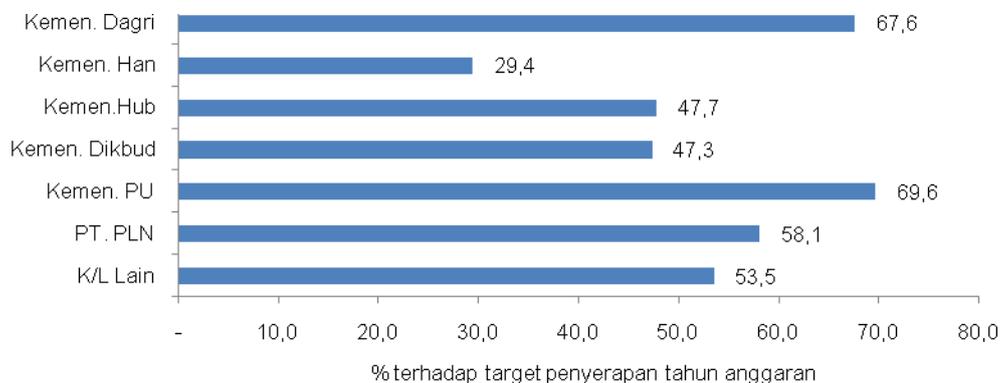
Secara ringkas, kinerja penyerapan dari 6 instansi yang memiliki nilai pinjaman terbesar dapat dilihat pada Gambar 6 dan Gambar 7. Realisasi penyerapan kumulatif tertinggi sampai dengan 31 Desember 2012 dicapai oleh Kementerian Dalam Negeri, diikuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum, PT PLN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan.

Tabel 6. Persentase Realisasi Penyerapan Kumulatif Pinjaman Proyek Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab Posisi 31 Desember 2012



Kinerja penyerapan kumulatif untuk ke-6 instansi tersebut, tidak berbeda dengan kinerja penyerapan pada Tahun Anggaran 2012. Pada TA 2012, penyerapan tertinggi dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum, diikuti oleh Kementerian Dalam Negeri, PT PLN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pertahanan.

Tabel 7. Persentase Realisasi Penyerapan Pinjaman Proyek Luar Negeri Tahun Anggaran 2012 Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab Posisi 31 Desember 2012



BAB 2

Kinerja Pelaksanaan Pinjaman Proyek

Pemantauan kinerja pelaksanaan pinjaman dilakukan dengan mengukur pencapaian indikator output dan progres varian. Pencapaian indikator output diukur dengan membandingkan target pencapaian indikator output dengan realisasi pencapaian output setiap triwulannya, sedangkan progres varian adalah selisih antara

persentase penarikan kumulatif dengan persentase waktu terpakai sejak pinjaman tersebut efektif.

2.1. Kinerja Pencapaian Output

Dalam rangka mengukur kinerja pelaksanaan pencapaian output pinjaman luar negeri, maka instansi pelaksana proyek telah diminta untuk melaporkan pencapaian kinerja pelaksanaan proyek yang diukur dengan menggunakan indikator output. Pengukuran kinerja pelaksanaan pencapaian output sudah dimulai pada edisi Triwulan I TA 2012. Pada edisi Triwulan IV TA 2012 ini ditampilkan 6 proyek yang terdiri atas 2 proyek Bank Dunia yaitu *loan 4205-IND Early Childhood Education and Development* dan *loan 4789-IND Managing Higher Education for Relevance and Efficiency Project (IMHERE)*, 2 proyek ADB yaitu *loan 2285-INO Sustainable Aquaculture Development for Food Security and Poverty Reduction (SAFVER)* dan *loan 2416-INO Indonesia Vocational Education Strengthening*, serta 2 proyek JICA yaitu *loan IP-542 Utilization Project for Educational Quality Enhancement* dan *loan IP-550 Denpasar Sewerage Development II*.

2.1.1. Pinjaman Bank Dunia 4205-IND *Early Childhood Education and Development Project*

Early Childhood Education and Development Project adalah pinjaman Bank Dunia yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pinjaman ini bertujuan untuk meningkatkan proporsi jumlah anak dari keluarga miskin untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya melalui partisipasi dalam program pendidikan pengembangan anak usia dini (PAUD) yang efektif dan berkualitas.

Tabel 7. Gambaran Umum Pinjaman Bank Dunia 4205-IND *Early Childhood Education and Development Project*

Gambaran Umum	
Kode Pinjaman	4205-IND
Nama Pinjaman	Early Childhood Education and Development Project
Sumber Dana	Bank Dunia
Instansi Penanggungjawab	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pinjaman Efektif	11 Desember 2006

Gambaran Umum	
Penutupan Pinjaman	31 Desember 2013
Nilai Pinjaman	USD 71,2 juta
Penyerapan Kumulatif	USD 70,2 juta (98,6%)
Lokasi	21 provinsi di Indonesia

Pelaksanaan kegiatannya meliputi peningkatan pelayanan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat miskin dan melaksanakan pengembangan sistem pendidikan anak usia dini yang berkualitas disertai dengan pelaksanaan manajemen, pemantauan dan evaluasi kegiatan yang efektif. Pinjaman ini dilaksanakan di 21 provinsi dengan sasaran 3.000 desa yang berada di 50 kabupaten/kota. Gambaran umum dari pinjaman ini dapat dilihat pada tabel 7 diatas.

Early Childhood Education and Development Project memiliki 3 indikator output utama dari proyek ini yaitu (i) Meningkatkan pelayanan PPAUD terpadu kepada masyarakat miskin, (ii) Mengembangkan sistem program PPAUD yang berkualitas dan berkelanjutan, (iii) Pengembangan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi program yang efektif. Dari 9 indikator kinerja output, 7 indikator telah mencapai target sehingga masih tersisa 2 indikator kinerja output yang harus diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa laku pinjaman yaitu pada bulan Desember 2013. Sampai dengan Triwulan IV TA 2012 terdapat 2 indikator output yang harus diselesaikan yaitu:

1. Indikator output 7: Jumlah Kabupaten yang telah mengeluarkan regulasi yang mendukung Program PAUD.
Belum ada Kabupaten yang mengeluarkan regulasi dalam mendukung Program PAUD sehingga target yang direncanakan sampai dengan Triwulan IV TA 2012 sebanyak 8 kabupaten belum tercapai.
Alat ukur untuk indikator ini telah terjadi perubahan alat ukur yang semula masuknya PAUD dalam Renstrada menjadi Peraturan Daerah dan adanya seksi PAUD dalam struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Dinas Pendidikan Kabupaten.
2. Indikator output 8: Jumlah desa yang melakukan pemantauan berbasis masyarakat (tahunan).
Target tidak tercapai karena belum ada tambahan desa yang melakukan pemantauan berbasis masyarakat sesuai target yang direncanakan yaitu 720 desa. Pendataan sukar dilaksanakan karena bukti dari alat ukur indikator ini adalah adanya berita acara yang harus dibuat oleh Tim Pemantau Program (TPP) atas hasil kegiatan pemantauan yang dilakukan. TPP ini merupakan perwakilan masyarakat yang dipilih pada saat pembentukan TPK untuk melakukan pemantauan terhadap lembaga diwilayahnya secara berkala. Saat ini banyak TPP yang tidak membuat Berita Acara walaupun sebenarnya mereka telah melakukan pemantauan. Diperlukan penjelasan kepada TPP oleh unit penanggung jawab di pusat dan provinsi melalui pelaksana di lapangan terutama

DPIU, Konkab dan Fasilitator agar dapat memfasilitasi TPP dalam melaksanakan tugasnya.

Perkembangan pencapaian output dari pinjaman 4205-IND Early Childhood Education and Development Project dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini.

Tabel 8. Pencapaian Indikator Kinerja Output Pinjaman 4205-IND *Early Childhood Education and Development Project*

Masa Laku: 11/12/2006 - 31/12/2013

No.	Indikator Kinerja Output	Volume	Satuan	TA 2012		
				Target	Realisasi s.d TW IV	%
A. Meningkatkan layanan PPAUD terpadu kepada masyarakat miskin						
1.	Jumlah kelompok masyarakat yang telah menerima sosialisasi tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PPAUD)	6.000	Kelompok	Tercapai 100% pada TA 2011		
2.	Jumlah kelompok masyarakat yg menyerahkan pernyataan minat dalam PPAUD (direpresentasikan dengan penyerahan Rencana Kerja Masyarakat/RKM kepada <i>District</i> PIU)	6.000	Kelompok	Tercapai 100% pada TA 2010		
3.	Jumlah kelompok masyarakat yang menerima <i>Block Grants</i>	6.000	Kelompok	Tercapai 100% pada TA 2011		
4.	Jumlah AUD miskin yang terdaftar di layanan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)	738.888	Anak	Tercapai melampaui target (114,6%)		
B. Mengembangkan sistem Program PPAUD yang berkualitas dan berkelanjutan						
5.	Jumlah kabupaten yang memiliki pelatih telah mengikuti program pelatihan PAUD	50	Kabupaten	Tercapai 100% pada TA 2008		
6.	Jumlah lembaga yang memiliki standar Layanan PAUD dan menjadi Pusat PAUD percontohan	500	Lembaga	Tercapai 100% pada TA 2011		
7.	Jumlah Kabupaten yang telah mengeluarkan regulasi yang mendukung Program PAUD	50	Kabupaten	8	-	-
C. Pengembangan Pengelolaan, Pemantauan, dan Evaluasi Program yang Efektif						
8.	Jumlah desa yang melakukan pemantauan berbasis masyarakat (tahunan)	3.000	Desa	720	-	-
9.	Jumlah kelompok masyarakat yang telah menyampaikan laporan rutin ke kabupaten (<i>District</i> PIU)	6.000	Kelompok	Tercapai 100% pada TA 2011		

2.1.2. Pinjaman Bank Dunia 4789-IND *Managing Higher Education for Relevance and Efficiency Project*

Pinjaman Bank Dunia 4789-IND *Managing Higher Education for Relevance and Efficiency Project* yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari perguruan tinggi. Peningkatan kualitas pendidikan ini dilaksanakan dengan mendukung implementasi strategi jangka panjang pendidikan tinggi di Indonesia untuk memperkuat manajemen dan

administrasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dalam hal peningkatan kualitas akreditasi nasional. Selain itu, peningkatan kualitas perguruan tinggi dilaksanakan melalui pengembangan institusi perguruan tinggi melalui peningkatan manajemen dan administrasi perguruan tinggi yang menjadi sasaran. Gambaran umum mengenai pinjaman dimaksud dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Gambaran Umum Pinjaman Bank Dunia 4789-IND *Managing Higher Education for Relevance and Efficiency Project*

Gambaran Umum	
Kode Pinjaman	4789-IND
Nama Pinjaman	Managing Higher Education for Relevance and Efficiency Project
Sumber Dana	Bank Dunia
Instansi Penanggungjawab	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pinjaman Efektif	10 Desember 2005
Penutupan Pinjaman	31 Desember 2012
Nilai Pinjaman	USD 80,5 juta
Penyerapan Kumulatif	USD 73,1 juta (90,83%)

Dalam proyek IMHERE terdapat 5 indikator output utama yaitu (i) Modernisasi Institusi Pendidikan Tinggi, (ii) BAP-PT, (iii) Revitalisasi Universitas Terbuka, (iv) *Global Development Learn Network* (GDLN), (v) Block Grant dan Pinjaman. Tahun 2012 merupakan tahun akhir pelaksanaan proyek IMHERE, sebagaimana dilaporkan bahwa seluruh indikator output telah dilaksanakan sesuai target. Pada Triwulan IV TA 2012 terdapat 2 indikator kinerja output yang diselesaikan, yaitu (a) Tersusunnya laporan *tracer study* lulusan PT secara reguler, dan (b) Tersedianya data lulusan PT se-Indonesia. Kedua indikator tersebut telah diselesaikan sesuai masa laku pinjaman yaitu pada bulan Desember 2012, sementara indikator-indikator lainnya telah diselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya. Pencapaian output dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Pencapaian Indikator Kinerja Output Pinjaman 4789-IND *Managing Higher Education for Relevance and Efficiency Project* (IMHERE)

Masa Laku: 10/12/2005 – 31/12/2012

No.	Indikator Kinerja Output	Target Total	Satuan	TA 2012		
				Target	Realisasi s.d TW IV	%
A.	Modernisasi institusi pendidikan tinggi					

No.	Indikator Kinerja Output	Target Total	Satuan	TA 2012		
				Target	Realisasi s.d TW IV	%
1.	Tersusunnya laporan <i>tracer study</i> lulusan PT secara reguler	1	Kegiatan	Tercapai 100%		
2.	Tersedianya data lulusan PT se-Indonesia	1	Kegiatan	Tercapai 100%		
B. BAN-PT						
1.	Jumlah perguruan tinggi yang terakreditasi	4	PT	Tercapai 100% pada tahun 2009		
2.	Jumlah akreditasi profesi yang dibentuk	3	Profesi	Tercapai 100%		
C. Revitalisasi Universitas Terbuka						
1.	Terlaksananya TA kajian opsi revitalisasi UT	2	TA	Tercapai 100%		
2.	Jumlah Pusat Belajar Jarak Jauh Daerah yang terbentuk	30	Unit	Tercapai 100% pada tahun 2010		
3.	Jumlah mahasiswa yang terlayani Pusat Belajar Jarak Jauh Daerah	2.006	Mahasiswa	Tercapai 100% pada tahun 2010		
4.	Pengembangan dosen untuk studi S2 & S3 di luar negeri	5	Orang	Tercapai 100%		
D. Global Development Learn Network (GDLN)						
1.	Dikembangkannya proses belajar jarak jauh GDLN	1	Kegiatan	1	1	100,0
2.	Jumlah PTN yang menjadi pusat GDLN	6	PTN	6	6	100,0
E. Block Grant dari Pinjaman						
1.	Peningkatan kualitas, relevansi, dan tanggung jawab sosial	38	PT	Tercapai 100% pada tahun 2009		
2.	Penguatan manajemen institusi pada universitas negeri non-BHMN	29	PT	Tercapai 100% pada tahun 2010		
3.	Penguatan kapasitas manajemen PT BHMN	7	PT	Tercapai 100% pada tahun 2009		
4.	Penguatan kapasitas manajemen PT BHMN (performance based contract)	5	PT	Tercapai 100% pada tahun 2009		

2.1.3. Pinjaman ADB 2285-INO Sustainable Aquaculture Development For Food Security And Poverty Reduction (SAFVER)

Pinjaman ADB 2285-INO Sustainable Aquaculture Development For Food Security And Poverty Reduction (SAFVER) dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dilaksanakan di 5 kabupaten dengan sasaran 14.000 anggota keluarga nelayan, khususnya nelayan miskin yang berada di kabupaten-kabupaten tersebut.

Tabel 11. Gambaran Umum Pinjaman ADB 2285-INO Sustainable Aquaculture Development for Food Security and Poverty Reduction (SAFVER)

Gambaran Umum	
Kode Pinjaman	2285-INO

Gambaran Umum	
Nama Pinjaman	Sustainable Aquaculture Development for Food Security and Poverty Reduction
Sumber Dana	ADB
Instansi Penanggungjawab	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pinjaman Efektif	15 Juli 2007
Penutupan Pinjaman	31 Desember 2013
Nilai Pinjaman	USD 34,40 juta
Penyerapan Kumulatif	USD 28,2 juta (82,1%)
Lokasi	Kabupaten Langkat, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Buton

Proyek ini terdiri atas 3 indikator output utama, yaitu (i) Budidaya Peningkatan Produksi, (ii) Budidaya Layanan Dukungan, serta (iii) Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Proyek. Dalam pelaksanaannya, hampir seluruh target output di TA 2012 tercapai. Output yang tidak tercapai berada di komponen budidaya peningkatan produksi untuk indikator jumlah rumah tangga yang terorganisir dan jalan/jalur yang direhabilitasi. Walaupun ada target yang tidak tercapai pada TA 2012, realisasi secara total sudah melewati target yang direncanakan. Pada TA 2013, proyek akan tetap melaksanakan kegiatan pada komponen penguatan kelembagaan dan manajemen proyek, yang fokus kegiatannya adalah pada pelatihan pada penyuluh dan staf pendukung.

Pencapaian indikator kinerja output dari proyek SAFVER sampai Triwulan IV TA 2012 dapat dilihat pada Tabel 12 berikut ini.

Tabel 12. Pencapaian Indikator Kinerja Output Pinjaman 2285-INO Sustainable Aquaculture Development For Food Security And Poverty Reduction

Masa laku: 13/07/2007 - 31/12/2013

No.	Indikator Kinerja Output	Target Total	Satuan	TA 2012		
				Target	Realisasi s.d TW IV	%
A.	Budidaya Peningkatan Produksi					
1.	Jumlah rumah tangga terorganisir	14.000	Orang	3.573	2.587	72,4
2.	Tambak direhabilitasi dan dikelola (5.700 direvisi menjadi 4.100)	4.100	Ha	900	900	100
3.	Keramba budidaya yang didirikan dan dikelola	300	Unit	80	80	100
4.	Budidaya Air Payau yang didirikan	100	Unit	Target tercapai pada TA 2011		
5.	Budidaya Air Laut yang didirikan	50	Unit	Target tercapai pada TA 2011		
6.	Fasilitas kultur Rumput Laut yang dikembangkan (1 farmer/0.2 ha)	500	Ha	186	186	100
7.	Kolam air tawar direhabilitasi atau didirikan	45	Ha	Target tercapai pada TA 2010		
8.	Budidaya air tawar yang didirikan	100	Unit	42	42	100

No.	Indikator Kinerja Output	Target Total	Satuan	TA 2012		
				Target	Realisasi s.d TW IV	%
9.	Tempat penetasan ikan air tawar yang direhabilitasi dan didirikan	27	Unit	Target tercapai pada TA 2011		
10.	Fasilitas air yang disediakan	150	Unit	6	6	100
11.	Jalan dan jalur direhabilitasi	60	Km	28	28	100
B.	Budidaya Layanan Dukungan					
1.	Jumlah kelompok dilayani oleh penyuluh	930	Grup	194	194	100
2.	Jumlah kelompok perempuan dilayani oleh penyuluh	200	Grup	87	87	100
3.	Jumlah penerima manfaat dengan input produksi	14.000	Orang	3.317	3317	100
4.	Jumlah kegiatan penyuluhan yang dilakukan	300	Kali	1.835	1835	100
5.	Laboratorium kualitas air dan penyakit ikan yang dikembangkan	5	unit	Hanya diselesaikan 4 unit		
C.	Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Proyek					
1.	Staf DGA dan DFS dilatih dalam akuakultur, lingkungan, Pengadaan, dll	92	Orang	98	98	100
2.	Petugas penyuluh yang dibekali dengan pelatihan dan peralatan	70	Orang	72	72	100
3.	Pusat-pusat teknis Budidaya yang direnovasi	5	unit	Target tercapai pada TA 2011		

2.1.4. Pinjaman ADB 2416-INO *Indonesia Vocational Education Strengthening Project (INVEST)*

Sejalan dengan pengembangan sekolah menengah kejuruan (SMK) berupa rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) dari tahun 2008-2013, Direktorat Pembinaan SMK pinjaman dari Asian Development Bank menyelenggarakan program *Indonesia Vocational Education Strengthening Project* yang mencakup pembinaan 90 SMK Model dan 230 SMK Aliansi. Pinjaman ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kesempatan bekerja bagi lulusan SMK, proyek INVEST ini mempunyai 2 indikator output utama dari proyek ini, yaitu (i) pengembangan SMK Model dan SMK Aliansi dan (ii) pelatihan guru. Dari 5 indikator kinerja output, 2 indikator telah mencapai target diantaranya yaitu Pengadaan Peralatan SMK Aliansi pada Tahun Anggaran 2011 dan Pelatihan Guru pada Tahun Anggaran 2010.

Tabel 13. Gambaran Umum Pinjaman ADB 2416-INO *Indonesia Vocational Education Strengthening Project (INVEST)*

Gambaran Umum	
Kode Pinjaman	2416-INO
Nama Pinjaman	Indonesia Vocational Education Strengthening Project (INVEST)
Sumber Dana	ADB
Instansi Penanggungjawab	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pinjaman Efektif	9 Juni 2008
Penutupan Pinjaman	30 November 2013
Nilai Pinjaman	USD 77,9 juta
Penyerapan Kumulatif	USD 63,4 juta (81,3%)

Program pelatihan guru telah diselesaikan pada TA 2010. Sedangkan pengadaan peralatan untuk 230 SMK Aliansi telah mencapai 100% pada TA 2011. Pada TA 2012 ini, proyek melaksanakan kegiatan pengembangan civil works, pengembangan non-fisik yang terkait dengan kegiatan belajar-mengajar dan pengadaan peralatan untuk 90 SMK Model.

Pengadaan peralatan untuk 90 SMK Model telah dilaksanakan pada Triwulan III TA 2012. Sedangkan untuk pengembangan fisik dan non fisik SMK Model, sampai dengan Triwulan IV TA 2012, progres pelaksanaan baru mencapai 80%. Pelaksanaan kegiatan terhambat karena dana untuk pelaksanaan kegiatan di tahun sebelumnya baru dicairkan pada akhir tahun anggaran. Selain itu, pada pelaksanaan di tahun 2012 ini terdapat SMK yang mengalami hambatan teknis seperti kurangnya jumlah pekerja terampil dan kondisi lahan SMK yang menjadi target proyek. Pencapaian output pada proyek *Indonesia Vocational Education Strengthening* adalah sebagai berikut.

Tabel 14. Pencapaian Indikator Kinerja Output Pinjaman 2416-INO *Indonesia Vocational Education Strengthening Project (INVEST)*

Masa laku: 9/06/2008 - 30/11/2013

No.	Indikator Kinerja Output	Target Total	Satuan	TA 2012		
				Target	Realisasi s.d. TW III	%
A.	Program Pengembangan SMK Model dan SMK Aliansi					
1.	Pengembangan Fisik (Civil Works) SMK Model	90	SMK	90	72	80
2.	Pengembangan Non-Fisik (KBM) SMK Model	90	SMK	90	72	80
3.	Pengadaan Peralatan SMK Model	90	SMK	90	90	100
4.	Pengadaan Peralatan SMK Aliansi	230	SMK	Target tercapai pada TA 2011		
B.	Pelatihan Guru					
1.	Pelatihan Guru	14	kali	Target tercapai pada TA 2010		

2.1.5. Pinjaman JICA IP-542 *ICT Utilization Project for Educational Quality Enhancement in Yogyakarta Province*

Proyek pinjaman JICA IP-542: *ICT Utilization Project for Educational Quality Enhancement in Yogyakarta Province* bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi khususnya di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 15. Gambaran Umum Pinjaman JICA IP-542 *ICT Utilization Project for Educational Quality Enhancement in Yogyakarta*

Gambaran Umum	
Kode Pinjaman	IP-542
Nama Pinjaman	ICT Utilization Project for Educational Quality Enhancement in Yogyakarta Province
Sumber Dana	JICA
Instansi Penanggungjawab	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Pinjaman Efektif	29 Maret 2007
Penutupan Pinjaman	29 Mei 2015
Nilai Pinjaman	JPY 2.911,0 juta
Penyerapan Kumulatif	JPY 1.083,2 juta (37,2%)

Peningkatan mutu pendidikan tersebut diwujudkan dalam pembangunan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) beserta jaringannya di 500 sekolah yang berada di 5 kota/kabupaten di provinsi DIY, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul.

Pemasangan peralatan TIK sudah dilaksanakan di 350 sekolah atau 70,0% dari target sebanyak 500 sekolah. Sisa 150 sekolah yang awalnya akan diselesaikan pada tahun 2012, pelaksanaannya mundur menjadi tahun 2013. Proses lelang untuk pemasangan di 150 sekolah sedang berjalan dan direncanakan dapat ditandatangani pada awal Triwulan I TA 2013. Pelaksanaan pemasangan peralatan YIK tersebut akan diselesaikan pada tahun 2013. Keterlambatan proses pengadaan tersebut disebabkan adanya proses evaluasi pada pelaksanaan paket-paket sebelumnya untuk memastikan tidak terdapat masalah dalam pelaksanaannya. Selain itu, diperkirakan akan ada sisa pinjaman sebesar JPY 1.488,8 juta dari total nilai pinjaman sebesar JPY 2.911,0 juta.

Tabel 16. Pencapaian Indikator Kinerja Output Pinjaman IP-542 *ICT Utilization Project for Educational Quality Enhancement in Yogyakarta Province*

Masa Laku : 29/03/2007 – 29/05/2015

No.	Indikator Kinerja Output	Target Total	Satuan	TA 2012		
				Target	Realisasi s.d TW IV	%
1.	Terpasangnya peralatan TIK (teknologi informasi dan komunikasi) beserta jaringannya dalam rangka Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan di DIY	500	Sekolah	150	-	0,0

2.1.6. Pinjaman JICA IP-550 *Denpasar Sewerage Development Project II*

Proyek IP-550 *Denpasar Sewerage Development Project II* bertujuan untuk memperluas *coverage ratio* dari sistem pembuangan limbah dan membangun sistem operasi dan pemeliharaan dengan memperluas fasilitas pengolahan air limbah (pipa saluran pembuangan) di Denpasar, Kuta, dan Sanur di Provinsi Bali serta mengembangkan sistem pelaksanaan yang berkaitan dengan administrasi layanan fasilitas pembuangan oleh pemerintah daerah. Area layanan di Denpasar mencakup 280 ha dengan perkiraan sekitar 33.000 penduduk terlayani, di Sanur mencakup 160 Ha dengan perkiraan 5.300 penduduk terlayani dan di Kuta mencakup 365 Ha dengan perkiraan kurang lebih 12.300 penduduk terlayani (Buku Profil Denpasar Sewerage Development Project, Ditjen Cipta Karya, 2011). Gambaran umum mengenai pinjaman IP-550 *Denpasar Sewerage Development Project II*.

Tabel 17. Gambaran Umum Pinjaman JICA IP-550 *Denpasar Sewerage Development Project II*

Gambaran Umum	
Kode Pinjaman	IP-550
Nama Pinjaman	Denpasar Sewerage Development Project II
Sumber Dana	JICA
Instansi Penanggungjawab	Kementerian Pekerjaan Umum
Pinjaman Efektif	25 Juli 2008
Penutupan Pinjaman	25 Juli 2015
Nilai Pinjaman	JPY 6.004,0 juta
Penyerapan Kumulatif	JPY 4.688,5 juta (78,1%)

Sampai dengan Triwulan IV TA 2012, sebagian besar kegiatan pada pinjaman IP-550 sudah selesai. Proyek *Denpasar Sewerage Development Project II* ini mempunyai 3 indikator output utama, yaitu (i) Terpasangnya pipa saluran pembuangan (*sewer pipe*), (ii) Terbangunnya jaringan drainase dan (iii) Terlaksananya pekerjaan *urgent works sewer*, dimana untuk indikator kinerja output pada poin (i) dan (ii) sudah memenuhi target realisasi 100% pada Tahun Anggaran 2011 dan 2012. Sisa pekerjaan adalah menyelesaikan pekerjaan pembangunan

urgent works sewerage yang direncanakan akan selesai seluruhnya pada tahun 2014. Dari target pembangunan *urgent work sewer* sepanjang 18.500 meter, sampai dengan TA 2012 sudah terbangun kurang lebih 11.100 meter saluran. Realisasi pembangunan ini sesuai dengan target pelaksanaan di tahun 2012 sepanjang 11.100 meter saluran. Pelaksanaan sisa pekerjaan pembangunan *urgent works sewer* ini direncanakan akan selesai pada TA 2014.

Tabel 18. Pencapaian Indikator Kinerja Output Loan IP-550 Denpasar Sewerage Development Project II

Masa Laku : 25/07/2008 – 25/07/2016

No.	Indikator Kinerja Output	Target Total	Satuan	TA 2012		
				Target	Realisasi s.d TW IV	%
1.	Terpasangnya pipa saluran pembuangan (<i>sewer pipe</i>)	79.681	meter	2.390	2.390	100
2.	Terbangunnya jaringan drainase	1.589	meter	Target sudah tercapai 100% pada tahun 2011		
3.	Terlaksananya pekerjaan <i>urgent works sewer</i>	18.500	meter	11.100	11.100	100

2.2. Progres Varian

Progres Varian adalah selisih antara persentase penarikan kumulatif dengan persentase waktu terpakai sejak pinjaman tersebut efektif

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan proyek adalah *progres varian* atau PV. Angka progres varian yang semakin kecil dari minus 30 mengindikasikan bahwa suatu proyek mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan (*serious delay*).

Pada Triwulan IV TA 2012 ini dapat diidentifikasi bahwa terdapat 58 atau 31,0% dari 187 proyek yang dipantau pelaksanaannya, memiliki nilai PV ≤ -30 . Ke-58 pinjaman tersebut tersebar di 12 Kementerian/Lembaga/BUMN. Proyek-proyek tersebut sebagian besar berada di Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan dan PT.PLN. Di Kementerian Pekerjaan Umum terdapat 14 proyek atau 31,8% dari 44 proyek yang memiliki progres varian ≤ -30 . Untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat 11 proyek atau 47,8% dari 26 proyek, sedangkan di Kementerian Perhubungan terdapat 8 proyek atau 50,0% dari 16 proyek dan di PT PLN terdapat 12 proyek atau 44,4% dari 27 proyek yang memiliki progres varian ≤ -30 .

Daftar pinjaman proyek dengan progres varian ≤ -30 dapat dilihat pada Tabel 19 berikut ini.

Tabel 19. Pinjaman Proyek Dengan Progres Varian ≤ -30

No.	Instansi Penanggung Jawab>Nama Pinjaman		Kreditur	Progres Varian
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM				
1.	7669-ID	Dam Operational Improvement and Safety Project	World Bank	-55,1
2.	2500-INO	Integrated Citarum WRMP	ADB	-66,0
3.	2501-INO	Integrated Citarum WRMP	ADB	-34,5
4.	2654-INO	Metropolitan Sanitation Management Health Project	ADB	-47,0
5.	IP-523	Komerling Irrigation Project Stage Phase II	JICA	-31,8
6.	IP-529	Tanjung Priok Acces Road Construction Project I	JICA	-39,5
7.	IP-531	Tanjung Priok Acces Road Construction Project II	JICA	-69,1
8.	IP-551	Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities	JICA	-38,9
9.	IP-552	Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Res.	JICA	-35,6
10.	IND-0147	PNPM-Integrated Comm. Driven Dev't II	IDB	-48,7
11.	IND-0150	PNPM-Integrated Comm. Driven Dev't II	IDB	-49,5
12.	AIPRD-L-002	Eastern Indonesia National Road Improvement	Australia	-31,0
13.	EDCF INA-11	Manado By-Pass Project Phase II	Korea	-64,5
14.	EDCF INA-17	Padang By-Pass Capacity Expansion Project	Korea	-37,7
KEMENTERIAN PERTANIAN				
15.	IND-0125	The Post Tsunami Rehab of Agric. Infra. In NAD	IDB	-35,9
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
16.	IP-553	Development of Bandung Institute of Technology	JICA	-32,6
17.	IND-115	The North Sumatera University Hospital	IDB	-96,1
18.	IND-129	Development and Upgrading of The State University of Jakarta	IDB	-62,3
19.	IND-130	Development and Upgrading of The State University of Jakarta	IDB	-36,8
20.	IND-137	The Dev't of Medical Education & Research Center	IDB	-47,7
21.	IND-138	The Dev't of Medical Education & Research Center	IDB	-48,0
22.	IND-140	The Quality Improvement of Padjajaran University	IDB	-33,9
23.	IND-141	The Quality Improvement of Padjajaran University	IDB	-33,9
24.	IND-153	Dev. & Quality Improvement of State University of Semarang Project	IDB	-35,3
25.	IND-154	Dev. & Quality Improvement of State University of Semarang Project	IDB	-35,3
26.	SFD/8/526	Construction of Two University Hospital in UNS	Saudi Fund	-35,6
KEMENTERIAN KEUANGAN				
27.	4762-IND	Government Financial Management and Revenue Adm. Project	World Bank	-44,1
28.	7631-ID	Project for Indonesian Tax Administration Reform.	World Bank	-52,4
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN				
29.	IP-521	The Urgent Rehab. Project of Tj. Priok	JICA	-62,2
30.	IP-508	Railway Electrification and DD Tracking Project 1	JICA	-64,8
31.	IP-540	Railway DT on Java South Line III	JICA	-46,8
32.	IP-548	Double Track Cirebon-Kroya Phase I & III	JICA	-52,0
33.	IP-554	Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project	JICA	-34,3
34.	IND-133	Development of Belawan Port Phase I	IDB	-64,7
35.	ID 00264	Procurement of 30 Unit Airport Rescue and Fire Fighting	Belanda	-41,8
36.	2005 66 612	Track Maintenance Improvement Programme	Jerman	-65,1
KEMENTERIAN KESEHATAN				
37.	INA-14	Improvement Of H Adam Malik in Medan	Korea	-62,6

No.	Instansi Penanggung Jawab>Nama Pinjaman	Kreditur	Progres Varian
38.	INA-15 Upgrading of Prof. Dr. Kandaou Hospital in Manado KEMENTERIAN KOMINFO	Korea	-83,0
39.	IP-542 ICT Utilization Project for Educational Quality Enh. KEMENTERIAN AGAMA	JICA	-33,3
40.	IND-0113 The Reconstruction of IAIN Ar Raniry	IDB	-93,2
41.	IND-0126 Upgrading & Dev of The SIU of S. Gunung Djati	IDB	-61,1
42.	IND-0127 Upgrading & Dev of The SIU of S. Gunung Djati KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	IDB	-79,9
43.	IND-0121 Dev't of Belawan and Sibolga Fishing Port BAPPENAS	IDB	-50,2
44.	2264-INO (SF) Infrastructure Reform Sector Dev. Project PT. PLN	ADB	-33,9
45.	7905-ID ERP Sumatera and Sulawesi	World Bank	-31,2
46.	7940-ID Power Transmission Development Project	World Bank	-32,4
47.	2619-INO Java-Bali Electricity Distribution Performance Imp. Project	ADB	-45,0
48.	IP-516 Semarang PP Rehab & Gasfication	JICA	-93,6
49.	IP-532 Asahan Hydroelectric Power Plant Construction III	JICA	-48,3
50.	IP-537 PLN Operation Improvement System for Supp. Generation Facilities	JICA	-39,4
51.	IP-539 North-West Sumatera Interconnection Transmission	JICA	-47,7
52.	BEF-003 Scattered Containerized Diesel Power Project	Belgia	-96,7
53.	CID101901F Java-Bali Electricity Distribution Performance Imp. Project	Perancis	-47,8
54.	21.12.2011 Java Bali Submarine Cables	FKE	-100,0
55.	JBIC CLA-2 Rehabilitation PLTU Suralaya Steam Power Plant	FKE	-45,2
56.	JBIC CLA-4 Rehabilitation & Modernization of Paiton SPP 1 PT. SMI	FKE	-35,0
57.	7731-ID Indonesia Infrastructure Finance Facility	World Bank	-53,2
58.	2516-ID Indonesia Infrastructure Finance Facility	ADB	-63,8

Sumber : Bappenas, Lampiran LKPPHLN Edisi Triwulan IV Tahun 2012 (diolah).

BAB III

Pemantauan Lapangan

Pada Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN edisi Triwulan IV TA 2012 ini disajikan beberapa laporan pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri yang diperoleh dari pemantauan lapangan, yaitu: Pinjaman Bank Dunia 4260-IND *Farmer Empowerment through Agriculture Technology and Information* (FEATI), Pinjaman IFAD 645-ID *Rural Empowerment and Agriculture Development Programme in Central Sulawesi*, Pinjaman Bank Dunia 4789-IND *Managing Higher Education for Relevance and Efficiency*, Pinjaman JICA IP-553 *Development of Bandung Institute of Technology (III)* dan Pinjaman ADB 2416-INO *Vocational Education Strenghtening Project*.

3.1. Pinjaman Bank Dunia 4260-IND *Farmer Empowerment Through Agriculture Technology and Information* (FEATI) : Gorontalo dan Kalimantan Barat

Informasi Ringkas

Proyek *Farmer Empowerment through Agriculture Technology and Information* (FEATI) dibiayai dari pinjaman Bank Dunia dengan nilai pinjaman sebesar USD 92,8 juta. Proyek yang mulai efektif pada 30 Juni 2007 dan akan berakhir pada 30 Juni 2013 ini bertujuan memberdayakan petani dan organisasi petani dalam meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan aksesibilitas terhadap informasi, teknologi, modal dan sarana produksi, pengembangan agribisnis dan kemitraan usaha yang dilaksanakan di 18 provinsi.

Tabel 20. Gambaran Umum Pinjaman Bank Dunia 4260-IND *Farmer Empowerment Through Agriculture Technology and Information*

Gambaran Umum	
Pengelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. CPMU : Badan Pengembangan SDM Pertanian (USD 2,71 juta) 2. Sub-CPMU : PUSDATIN (USD 1,11 juta) 3. Sub-CPMU: Balai Besar Pengkajian Teknologi Pertanian (USD 0,28 juta) 4. BPTP Provinsi (USD 2,12 juta) 5. PPMU : Provinsi (USD 1,52 juta) 6. DPIU : Kabupaten (USD 28,30 juta)
Sumber Pembiayaan	IDA 7427-IND dan IBRD 4260-IND sebesar USD 84,14 juta
Masa Laku Pinjaman	30 Juni 2007 – 30 Juni 2013
Kategori pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Goods, Civil Works, Training, Op. Cost</i> 2. <i>Farmers Managed Extension Activites /FMA</i> 3. <i>Consulting Services</i>

Gambaran Umum				
	4. <i>Unallocated</i> 5. <i>Fee</i>			
Ruang lingkup pekerjaan	1. Pengembangan kelembagaan penyuluhan; 2. Pengembangan kelembagaan petani; 3. Penguatan ketenagaan penyuluhan; 4. Perbaikan sistem dan metode penyuluhan; 5. Perbaikan penyelenggaraan penyuluhan; 6. Penguatan dukungan teknologi pada usaha tani/agribisnis di tingkat petani; 7. Perbaikan pelayanan teknologi dan informasi pertanian.			
Sasaran	1. Petani yang telah tergabung dalam kelompok tani (Poktan); 2. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan); 3. Asosiasi dan korporasi petani.			
Lokasi	Provinsi	Jumlah		
		Kab	Kec	Desa
	Sumatera Utara	5	72	270
	Sumatera Barat	5	59	190
	Jambi	2	20	80
	Sumatera Selatan	1	11	40
	Banten	1	15	40
	Jawa Barat	8	118	320
	Jawa Tengah	4	48	210
	DI.Yogyakarta	3	41	180
	Jawa Timur	4	44	160
	Nusa Tenggara Barat	5	59	240
	Nusa Tenggara Timur	6	88	240
	Sulawesi Utara	6	68	300
	Gorontalo	4	39	160
	Sulawesi Tengah	1	14	40
	Sulawesi Tenggara	5	74	280
	Sulawesi Selatan	6	71	280
	Kalimantan Barat	2	28	80
	Kalimantan Selatan	3	15	120
	18	71	884	3.230

Target lokasi proyek ini yaitu 71 Kabupaten dengan cakupan 3.230 desa. Kunjungan lapangan dilakukan di 2 kabupaten yang berada Provinsi Gorontalo dan 2 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat.

Kinerja Pelaksanaan

1. Provinsi Gorontalo

Telah dibentuk 130 FMA (*Farmers Managed Extension Activities*) di 4 kabupaten, yaitu Kab. Boalemo, Kab. Gorontalo, Kab. Pohuwato, dan Kabupaten Bone Bolango. Kunjungan lapangan bertujuan memperoleh data dan informasi sejauh mana peran penyuluh dan kontribusi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) dalam meningkatkan pengetahuan petani melalui penggunaan teknologi informasi sehingga terjadi perubahan pola pikir dari semula hanya berorientasi pada bertanam biasa menjadi berorientasi pada kebutuhan pasar. Kunjungan lapangan dilakukan di 2 kabupaten sasaran yaitu Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Dari kunjungan tersebut diperoleh informasi bahwa keberadaan kantor Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) di daerah tersebut sangat membantu para petani sebagai sarana informasi dan berdiskusi. Namun sarana teknologi informasi seperti laptop/komputer, akses internet belum dapat difungsikan secara optimal.

Dari kunjungan tersebut diketahui bahwa diperlukan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Daerah setempat agar proyek ini dapat bermanfaat bagi petani seoptimal mungkin karena sejak tahun 2007 proses pembelajaran FMA telah dikembangkan dari semula yang hanya berupa materi teknis pertanian, bertambah dengan materi manajemen dan pemasaran mulai tahun 2008 dan sejak tahun 2012 menjadi upaya pembentukan lembaga ekonomi pertanian.

2. Provinsi Kalimantan Barat

Pelaksanaan FEATI di Provinsi Kalimantan Barat diselenggarakan di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sambas. Pada awal pelaksanaannya, setiap kabupaten mempunyai 40 desa yang menjadi sasaran pelaksanaan FEATI dan pada tahun 2012 tersisa 10 desa yang mendapatkan dana FEATI. Hal ini sesuai dengan *exit strategy* untuk menambah kemandirian petani menjelang berakhirnya masa pinjaman ini.

Beberapa kendala yang bisa ditemui dalam kunjungan ke dua kabupaten ini adalah tingkat pemahaman dan kapasitas tim pengelola FMA di tingkat kecamatan maupun desa terhadap konsep FEATI dan implementasi dari FMA yang masih bervariasi. Selain itu terdapat kendala administrasi khususnya dalam hal pembayaran karena adanya revisi/perubahan DIPA.

Untuk menunjang keberlanjutan pelaksanaan program maka telah dilakukan upaya-upaya pendampingan dan pengawalan yang ketat serta fasilitasi dalam implementasi FMA dari mulai persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyusunan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan. Selain itu peningkatan kapasitas tim pengelola kecamatan dan desa dilakukan melalui pembinaan, kunjungan dan pertemuan rutin yang diadakan setiap bulan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya menumbuhkan semangat kemandirian bagi setiap kelompok tani agar bisa tumbuh dan berkembang dengan kemampuan mereka sendiri, mengingat bantuan melalui proyek ini akan berakhir seiring dengan selesainya masa laku pinjaman ini.

Kemandirian ini juga memerlukan dukungan dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk meneruskan program yang sudah dirintis dari pinjaman ini.

3.2. Pinjaman IFAD 645-ID *Rural Empowerment and Agriculture Development*

Informasi Ringkas

Proyek *Rural Empowerment and Agriculture Development* (READ) telah efektif sejak tanggal 18 November 2008 dan akan berakhir pada 31 Desember 2014. Dana dari pinjaman IFAD ini tersebar di 150 desa yang berada di 5 kabupaten (Parigi, Poso, Banggai, Toli-Toli, dan Buol). Dana ini diberikan kepada beberapa kelompok yang sudah ditentukan berdasarkan persyaratan yang diberikan oleh IFAD dalam rangka untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Selain pinjaman, terdapat juga porsi Hibah dari IFAD namun hanya diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan di pusat.

Tabel 21. Gambaran Umum Pinjaman IFAD 645-ID *Rural Empowerment and Agriculture Development*

Gambaran Umum	
Kode Pinjaman	645-ID
Nama Pinjaman	Rural Empowerment and Agriculture Development
Sumber Dana	IFAD
Instansi Penanggungjawab	Kementerian Pertanian
Pinjaman Efektif	18 November 2008
Penutupan Pinjaman	31 Desember 2014
Nilai Pinjaman	SDR 14,3 juta
Penyerapan Kumulatif	SDR 9,2 juta (64,3%)

Sasaran dari program ini adalah peningkatan ekonomi dari tiap lapisan masyarakat, yaitu:

- Pada tingkat rumah tangga, dengan menargetkan pada masyarakat miskin, etnis minoritas, perempuan dan penduduk miskin di dataran tinggi.
- Pada tingkat masyarakat, dengan menargetkan masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan.
- Pada tingkat ekonomi makro, secara keseluruhan bagi provinsi Sulawesi Tengah.

Dana bantuan program yang diberikan, selain digunakan untuk meningkatkan usaha masyarakat juga digunakan untuk membangun infrastruktur dimana diharapkan akan menghasilkan berbagai manfaat bagi masyarakat seperti terbangunnya akses jalan yang lebih baik, air minum bersih dan fasilitas irigasi, akses terhadap teknologi yang lebih modern, dan fasilitas infrastruktur lainnya. Dengan menggunakan teknologi dan sistem pertanian yang lebih modern, maka akan semakin membuka akses terhadap

pasar, meningkatkan hasil produksi dan akan berdampak pula pada peningkatan ekonomi petani.

Kinerja Pelaksanaan

Berdasarkan pemantauan di lapangan dan diskusi dengan penerima manfaat, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan proyek. Kendala tersebut diantaranya adalah tertundanya proses pengadaan peralatan karena kurangnya jumlah panitia pengadaan di daerah, kurangnya koordinasi antara pelaksana proyek di pusat dan di daerah karena luasnya jangkauan pelaksanaan proyek dan terdapat hambatan terkait dengan persetujuan atau tanggapan atas dokumen pengadaan dari pemberi pinjaman.

Rencana Tindak

Adapun rekomendasi langkah tindak lanjut yang diusulkan terhadap pelaksanaan proyek ini antara lain:

1. Koordinasi yang intensif antara pelaksana proyek di pusat dan di daerah harus lebih ditingkatkan, termasuk dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek.
2. Pihak pelaksana proyek (baik pusat maupun daerah) diharapkan berkoordinasi lebih intensif dengan pihak pemberi pinjaman perihal lamanya proses persetujuan atas dokumen yang memerlukan persetujuan pemberi pinjaman. Selain itu, untuk mempercepat proses persetujuannya, diharapkan kelengkapan syarat-syarat administrasi dokumen dipenuhi sebelum mengajukan persetujuan kepada pemberi pinjaman.



3.3. Pinjaman Bank Dunia 4789-IND *Managing Higher Education for Relevance and Efficiency*

Informasi Ringkas

Salah satu Perguruan Tinggi Negeri sasaran proyek *I-MHERE* adalah Institut Teknologi Bandung (ITB). Kegiatan *I-MHERE* di ITB dilaksanakan di 3 fakultas, yaitu Sekolah Farmasi (SF), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) dan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL). Memasuki tahun terakhir pelaksanaan proyek, indikator kinerja output telah tercapai, dengan adanya beberapa indikator telah melampaui target yang ditetapkan, meskipun terdapat indikator kinerja yang belum mencapai target, program master untuk FTSL mencapai 94% dan SF mencapai 96%. Hal ini terjadi karena beberapa kandidat mengundurkan diri dari program dan memilih program lain.

Tabel 22. Gambaran Umum Pinjaman Bank Dunia 4789-IND *Managing Higher Education for Relevance and Efficiency Project (IMHERE)*

Gambaran Umum	
Kode Pinjaman	4789-IND
Nama Pinjaman	Managing Higher Education for Relevance and Efficiency Project
Sumber Dana	Bank Dunia
Instansi Penanggungjawab	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pinjaman Efektif	10 Desember 2005
Penutupan Pinjaman	31 Desember 2012
Nilai Pinjaman	USD 80,5 juta
Penyerapan Kumulatif	USD 73,1 juta (90,83%)

Kinerja Pelaksanaan

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

- a. Secara umum publikasi jurnal telah mencapai target, namun publikasi jurnal secara nasional lebih rendah daripada publikasi jurnal secara internasional, karena ITB dan Ditjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lebih memberi dukungan untuk penerbitan jurnal secara internasional.
- b. Selain itu untuk publikasi internasional di FMIPA tidak dapat memenuhi target karena sulitnya mencari konsultan internasional yang mau bekerja dengan standar biaya yang dinilai terlalu rendah dalam jangka waktu 1 bulan menetap di Indonesia

3.4. Pinjaman JICA IP-553 *Development of Bandung Institute of Technology III*

Informasi Ringkas

Proyek *Development of Bandung Institute of Technology III* merupakan proyek yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas penelitian dan jumlah mahasiswa di ITB dengan meningkatkan fasilitas penelitian dan pendukungnya serta keterkaitan antara Universitas-Industri-Komunitas dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang akan menjadi inti dari industri dan penelitian akademis, industri nasional dan daya saing di dunia. Proyek ini dimulai tahun 2009 dan akan berakhir pada tahun 2018, namun pihak pelaksana proyek optimis pekerjaan akan dapat diselesaikan pada tahun 2015.



Tabel 23. Gambaran Umum Pinjaman JICA IP-553 *Development of Bandung Institute of Technology III*

Gambaran Umum	
Kode Pinjaman	IP-553
Nama Pinjaman	Development of Bandung Institute of Technology III
Sumber Dana	JICA
Instansi Penanggungjawab	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pinjaman Efektif	28 Juli 2009
Penutupan Pinjaman	30 September 2018
Nilai Pinjaman	JPY 5.659,0 juta
Penyerapan Kumulatif	JPY 267,5 juta (4,73%)

Kinerja Pelaksanaan

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain:

- Lamanya proses untuk mendapatkan persetujuan dari JICA yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan pengadaan untuk pembangunan 4 gedung (paket 1). Pengadaan ini diperkirakan membutuhkan waktu 6 bulan sehingga pembangunan fisik akan dimulai pada bulan Maret/April 2013. Oleh karena itu proyek baru melaksanakan renovasi gedung laboratorium hidrolik Teknik Sipil, renovasi atap gedung Fakultas Seni Rupa dan Desain.
- Perbedaan pemahaman antara pihak pelaksana proyek dan Bagian Logistik ITB yang merupakan pengelola keuangan dan pengadaan di lingkungan ITB secara terpusat memungkinkan terjadinya keterlambatan.

Untuk itu, pihak PIU perlu mengawal dan berkoordinasi secara intern dan dengan JICA agar proyek tidak mengalami keterlambatan.

3.5. Pinjaman ADB 2416-INO *Indonesia Vocational Education Strengthening Project (INVEST)*

Informasi Ringkas

Proyek *Vocational Education Strengthening* telah efektif sejak tanggal 9 Juni 2008 dan akan berakhir pada 30 November 2013. Dana dari pinjaman ADB ini disalurkan secara tersebar pada 90 SMK Model yang tersebar di 83 kabupaten/kota yang berada di 33 Provinsi di Indonesia. Target pengembangan utama proyek ini adalah 90 SMK Model, dimana setiap SMK Model memiliki 2-3 SMK Aliansi.

Tabel 24. Gambaran Umum Pinjaman ADB 2416-INO *Indonesia Vocational Education Strengthening Project (INVEST)*

Gambaran Umum	
Kode Pinjaman	2416-INO
Nama Pinjaman	Indonesia Vocational Education Strengthening Project (INVEST)
Sumber Dana	ADB
Instansi Penanggungjawab	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pinjaman Efektif	9 Juni 2008
Penutupan Pinjaman	30 November 2013
Nilai Pinjaman	USD 77,9 juta
Penyerapan Kumulatif	USD 63,4 juta (81,3%)

Dana yang digulirkan tersebut dialokasikan untuk:

- Pelaksanaan Pembangunan SMK berupa pembangunan fisik (civil works) dan peralatan, serta pembangunan non fisik berupa program kegiatan sekolah.
- Peralatan tangan dan ringan untuk SMK Aliansi.
- Peralatan *Manajemen Information System (MIS)*, Konsultan, Monitoring dan Evaluasi, Pelatihan Terpusat serta Manajemen proyek.

Kunjungan proyek dilakukan di 3 lokasi proyek yang berada di Surabaya, yaitu SMKN 1 yang merupakan SMK Manajemen Bisnis serta SMKN 2 dan SMKN 5 Surabaya yang merupakan SMK Teknologi. Ketiga SMK tersebut telah menerima dana bantuan sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini dengan besaran dana rata-rata berkisar Rp 3 Miliar per tahun.

Kinerja Pelaksanaan

Berdasarkan pemantauan di lapangan, beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan antara lain:

- a. Proses pengadaan peralatan yang mengalami penundaan serta penggantian yang disebabkan adanya perubahan spesifikasi ataupun peralatan yang diinginkan sudah tidak diproduksi ulang.
- b. Proses penyerahan terimaan asset serta keberlanjutan hasil proyek di masa yang akan datang masih belum disepakati siapa yang akan menanggung biaya pemeliharannya.
- c. Kurangnya koordinasi yang intensif antara pelaksana proyek di daerah dengan pelaksana proyek di pusat yang juga menjadi kendala di dalam proses pelaksanaan proyek.

Rencana Tindak

Adapun rekomendasi langkah tindak lanjut yang diusulkan terhadap pelaksanaan proyek ini yaitu koordinasi yang intensif antara pelaksana proyek di pusat dan di daerah harus lebih ditingkatkan, termasuk dalam hal serah terima aset serta pemeliharaan hasil proyek di waktu yang akan datang.

BAB IV

Kinerja Pelaksanaan Hibah Luar Negeri

Pada edisi Triwulan IV TA 2012 ini diambil 4 proyek hibah yang terdiri atas proyek hibah Bank Dunia *Support to BPK for Preparation of New Strategic Plan Project*, hibah Bank Dunia *Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)* dan *Extending Telecommunication in Rural Indonesia* dan hibah ADB *Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program-Citarum Watershed Management and Biodiversity Conservation*.

4.1. Hibah Bank Dunia *Support to BPK for Preparation of New Strategic Plan Project*

Informasi Ringkas

Tujuan dari hibah *Support to BPK for Preparation of New Strategic Plan Project* adalah membantu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengembangkan Rencana Strategis (Renstra) 2011-2015 dan implementasinya, serta memastikan bahwa proses penyusunannya sudah sesuai dengan *international best practice*. Hibah ini juga mencakup monitoring atas implementasi tahun pertama Renstra (TA 2011) untuk mengidentifikasi kendala yang ada sehingga bisa mendapatkan pelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasinya di tahun-tahun berikutnya.

Tabel 25. Gambaran Umum Hibah Bank Dunia *Support to BPK for Preparation of New Strategic Plan Project*

Gambaran Umum	
Kode Hibah	TF-096643
Nama Hibah	Support to BPK for Preparation of New Strategic Plan Project
Sumber Dana	Bank Dunia
Instansi Penanggungjawab	Badan Pemeriksa Keuangan
Nilai Hibah	USD 258 ribu
Hibah Efektif	4 Agustus 2010
Penutupan Hibah	4 Agustus 2013
Lokasi	Jakarta

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui pembiayaan hibah ini berupa :

- a. Penyusunan Renstra BPK Tahun 2011-2015 dengan bantuan konsultan internasional.
- b. Penyusunan Rencana Implementasi Renstra (RIR) Tahun 2011-2015.
- c. Pelaksanaan lokakarya penyusunan renstra, RIR, dan sosialisasinya.
- d. Pemantauan dan evaluasi implementasi Renstra di tahun 2011 yang disertai dengan pengembangan kapasitas *project management* .

Kinerja Pelaksanaan

Proses penyusunan Renstra Tahun 2011-2015 sudah dimulai sejak akhir tahun 2009. Dana hibah dimanfaatkan untuk membiayai komponen jasa konsultan (baik internasional maupun lokal) dan melaksanakan training. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan hibah ini meliputi : (1) Review atas draft Renstra beserta kertas kerja pendukungnya, (2) Penyusunan Rencana Implementasi Renstra (RIR), (3) Mengembangkan *project management* dalam pengelolaan Inisiatif Strategis (IS), (4) Pengembangan kapasitas *change management* dalam pengelolaan IS melalui training *change management*, serta (5) melakukan pemantauan dan evaluasi atas implementasi Renstra di tahun pertama (TA 2011).

Review atas draft Renstra dilaksanakan antara bulan November 2010 sampai Februari 2011 dengan mereview dokumen dan melaksanakan diskusi dengan berbagai pihak di BPK termasuk ketua dan anggota BPK serta jajaran eselon I dan II. Untuk mendukung pelaksanaan review, dilaksanakan pula *focus group discussion* (FGD) dan lokakarya. Pada tahapan ini dihasilkan keluaran berupa initial review atas draft Renstra, *briefing note* kepada BPK dan Renstra BPK Tahun 2011-2015. Dalam rangka mengakomodir perkembangan maka pada bulan Mei 2011, BPK menerbitkan Keputusan BPK No.3/K/I-XIII.2/5/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Penyempurnaan atas Keputusan BPK No.7/K/I-XIII/12/2010 tentang Renstra BPK Tahun 2011-2015.

Penyusunan Rencana Implementasi Renstra (RIR) dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 2011 dan dilaksanakan melalui kunjungan dan pelaksanaan FGD. Masukan untuk implementasi Renstra ini diwujudkan dalam *feedback on implementation strategy and matrix*. Keluarannya diwujudkan dalam bentuk 32 (tigapuluh dua) Inisiatif Strategis BPK yang akan dilaksanakan dalam rangka penerapan Renstra BPK Tahun 2011-2015. RIR BPK ini ditetapkan melalui Keputusan Sekjen BPK No.239/K/X-XIII.2/5/2011 tanggal 9 Mei 2011.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasinya tersebut, BPK memanfaatkan dana hibah untuk pengembangan kapasitas pengelolaan IS melalui pemilihan konsultan lokal untuk mengembangkan *project management* dan penyelenggaraan training *change management* bagi pengelola IS. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensi dari para pengelola IS serta memastikan bahwa pengelolaannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pemantauan dan evaluasinya dapat berjalan dengan baik.

Hibah ini pun dimanfaatkan BPK untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pencapaian implementasi Renstra di tahun pertama (TA 2011). Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan konsultan, terdapat 2 hal yang disarankan. Saran tersebut adalah BPK harus memusatkan perhatian pada hal-hal yang berpengaruh besar pada keberlangsungan BPK, sedangkan untuk strategi teknisnya diserahkan pada eselon I, II dan koordinator IS. Saran lainnya adalah pentingnya peningkatan change management dengan meningkatkan pengetahuan dan pelatihan. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh eselon I dan II adalah dengan mendengarkan saran/masukan dari koordinator IS, menyerap aspirasi dari berbagai kalangan BPK secara rutin dan memberikan contoh kepada bawahan.

Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh hibah ini selesai dilaksanakan pada akhir tahun 2011. Pada tahun 2012 ini tidak ada kegiatan yang dilaksanakan. Realisasi penarikan sampai dengan Triwulan IV TA 2012 mencapai USD 254,2 ribu atau 98,5% dari total nilai hibah. Realisasi tersebut berasal dari kegiatan di tahun 2010 sebesar USD 159,7 ribu dan kegiatan di tahun 2011 sebesar USD 94,5 ribu. Terdapat sisa alokasi sebesar USD 3,8 ribu yang tidak dimanfaatkan dan dikembalikan kepada Bank Dunia melalui penutupan rekening khusus.

4.2. Hibah Bank Dunia *Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)*

Informasi Ringkas

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) adalah hibah Bank Dunia dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan pengelolaan pendapatan negara dan daerah di bidang industri ekstraktif (sumber daya alam yang tidak terbarukan berupa mineral, batubara, minyak bumi dan gas). Hibah tersebut dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Total dana hibah yang dikelola sebesar USD 1,05 juta dan dimanfaatkan untuk *consultant services* dan *training* serta *workshop*.

Tabel 26. Gambaran Umum Hibah Bank Dunia *Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)*

Gambaran Umum	
Kode Hibah	TF-099302
Nama Hibah	Extractive Industries Transparency Initiative
Sumber Dana	Bank Dunia
Instansi Penanggungjawab	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Nilai Hibah	USD 1.050.000
Hibah Efektif	22 Juni 2011
Penutupan Hibah	30 April 2013
Lokasi	Jakarta

Kinerja Pelaksanaan

Sampai dengan Triwulan IV TA 2012, jumlah penarikan kumulatif hibah EITI mencapai USD 279,5 ribu atau 26,6% dari nilai hibah. Nilai kegiatan yang sudah terkontrak sampai dengan akhir TA 2012 sendiri mencapai USD 772,6 ribu yang terdiri dari pengadaan 8 consultant services dan pelaksanaan workshop. Ke-8 consultant services tersebut terdiri dari *team leader, revenue specialist, stakeholder specialist, communication specialist, administrator specialist, regulatory specialist, IT specialist* dan *financial analyst*. Untuk pengadaan EO (*event organizer*) workshop NGO dan komunikasi serta EO Media Publikasi, pihak Bank Dunia tidak dapat menyetujui pelaksanaan kegiatannya. Hal ini karena kegiatan non-consultant services tidak tercantum dalam dokumen perjanjian hibah.

Rencana Tindak

Untuk pelaksanaan kedua workshop tersebut, kegiatannya akan dilaksanakan dengan swakelola.

4.3. Hibah Bank Dunia *Extending Telecommunication in Rural Indonesia*

Informasi Ringkas

Proyek ini dilaksanakan untuk meningkatkan dan memfasilitasi akses publik terhadap internet khususnya di pedesaan, mengingat adanya tantangan yang besar dalam hal pemberian layanan ICT (*information and communications technology*) kepada penduduk di Indonesia yang tersebar di kurang lebih 17 ribu pulau.

Tabel 27. Gambaran Umum Hibah Bank Dunia *Extending Telecommunication in Rural Indonesia*

Gambaran Umum	
Kode Hibah	TF-092629
Nama Hibah	Extending Telecommunication in Rural Indonesia
Sumber Dana	GBOPA diadministrasikan oleh Bank Dunia
Instansi Penanggungjawab	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Nilai Hibah	USD 1.868.338
Hibah Efektif	19 Juni 2009
Penutupan Hibah	
- <i>Original</i>	31 Desember 2011
- Perpanjangan	30 Juni 2013
Lokasi	Provinsi Jawa Barat, Banten dan Lampung

Dalam rangka peningkatan layanan publik terhadap ICT, GBOPA (*Global Partnership Output Based Aid*) yang difasilitasi oleh Bank Dunia dengan Kementerian

Komunikasi dan Informatika sepakat untuk melaksanakan kerjasama melalui hibah *Extending Telecommunication in Rural Indonesia* dengan nilai sebesar USD 1,9 juta.

Proyek ini efektif pada tanggal 19 Juni 2009 dan akan berakhir masa lakunya pada tanggal 30 Juni 2013. Proyek ini akan memfasilitasi penyediaan akses internet dalam bentuk CAP (*Community Access Point*) yang selanjutnya disebut Wardes (Warung Internet Desa) di 112 lokasi yang tersebar di provinsi Jawa Barat (3 kabupaten) dan Banten (3 kabupaten) serta 110 lokasi di provinsi Lampung (11 kabupaten).

Pelaksanaan pembangunan Wardes atau CAP ini dilaksanakan melalui 2 bagian (*part*) dengan target total sebanyak 222 lokasi. *Part 1* dilaksanakan di provinsi Jawa Barat dan Banten dengan alokasi hibah sebesar USD 780 ribu, sedangkan *part 2* dilaksanakan di provinsi Lampung dengan alokasi sebesar USD 760 ribu dan sisanya dimanfaatkan untuk kontrak konsultan.

Kinerja Pelaksanaan

Sampai dengan Triwulan IV TA 2012 jumlah penarikan kumulatif hibah ini sudah mencapai USD 1,4 juta atau 75,7% dari nilai hibah secara keseluruhan. Pada tahun anggaran 2012 sendiri, penarikan mencapai USD 0,6 juta atau 88,6% dari target penarikan sebesar USD 0,7 juta.

Untuk *part 1* (Jawa Barat dan Banten) pelaksanaan proyek sudah mencapai 100% dari total target 112 lokasi di 6 kabupaten yaitu Sukabumi, Cianjur, Garut, Lebak, Serang dan Pandeglang. Tagihan sebesar Rp 1,7 milyar sudah dibayar pada bulan November 2012. Untuk *part 2* (Lampung), pelaksanaan proyek sudah menyelesaikan seluruh pembangunan (100%) dengan target 110 lokasi di 11 kabupaten dan tagihan untuk pembayaran Rp 1,7 milyar (25% dari total kontrak) sudah dibayar pada bulan Desember 2012. Masa pemeliharaan pada kedua *part* tersebut sudah dimulai dan akan berakhir pada bulan Juli 2013.

Hasil pekerjaan pada *part 1* dan *part 2* sedang diminta oleh Kemkominfo untuk diverifikasi oleh *independent verification agent* (IVA). Hal tersebut untuk memastikan bahwa wardes-wardes tersebut dapat berfungsi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian terkait dengan kontrak *management consulting services* (MSC) dan *communication specialist* (CS) adalah masa laku kontrak untuk kedua konsultan tersebut perlu segera diperpanjang mengingat pelaksanaan hibah masih akan berlangsung sampai tahun 2013. Konsultan tersebut dibutuhkan dalam kaitannya dengan proses administrasi, keuangan, supervisi, monitoring, publikasi maupun evaluasi pelaksanaan hibah.

Rencana Tindak

Proses verifikasi oleh *independent verification agent* untuk pekerjaan yang sudah selesai di *part 1* dan *part 2* agar dapat diselesaikan sesuai dengan rencana pelaksanaan. Proses verifikasi ini diperlukan untuk memastikan apabila ada

kekurangan atau hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat segera meminta kontraktor untuk memperbaiki dan disesuaikan dengan spesifikasi yang seharusnya. Selain itu, untuk memperlancar proses administrasi, keuangan, pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat segera memperpanjang kontrak konsultan, baik *management consulting services* maupun *communication specialist*.

4.4. Hibah ADB *Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program-Citarum Watershed Management and Biodiversity Conservation*

Informasi Ringkas

DAS Citarum, merupakan DAS yang paling strategis dan penting di Indonesia. DAS ini mencapai luas 13.000 km² dan didalamnya ada sekitar 9 juta penduduk. Tata guna lahan yang tidak terencana pada sekitar 150 tahun terakhir meninggalkan hanya sedikit ekosistem hutan hujan alam di Jawa yang terpencar-pencar di kawasan-kawasan hulu dan terhimpit gerak pembangunan yang terus berkembang, padahal hutan hujan alam merupakan habitat alam dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi, terutama hutan dataran rendah. Hampir semua kawasan hutan dataran rendah menerima dampak negatif dari kegiatan manusia, termasuk pemanenan hasil hutan non-kayu dan pohon untuk bahan bangunan dan kayu bakar, kerusakan kualitas air dan tanah karena polusi domestik, industri dan pertanian. Saat ini belum ada mekanisme yang tepat secara efektif dilaksanakan untuk mengatur tataguna lahan untuk memantau kegiatan pembangunan di Dalam DAS Citarum.

Tabel 28. Gambaran Umum Hibah ADB *Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program-Citarum Watershed Management and Biodiversity Conservation*

Gambaran Umum	
Kode Hibah	0216-INO
Nama Hibah	Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program-Citarum Watershed Management and Biodiversity Conservation
Sumber Dana	ADB
Instansi Penanggungjawab	Kementerian Kehutanan
Nilai Hibah	USD 3,7 juta
Hibah Efektif	16 Juni 2011
Penutupan Hibah	30 Juni 2014
Lokasi	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat (Burangrang, Kawah Kamojang, Gunung Tilu, Tangkuban Perahu, dan Gunung Masigit Kareumbi) dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Kegiatan hibah ini dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan DAS (daerah aliran sungai) Citarum secara terpadu agar tercapai kondisi sumber daya air dan daerah tangkapan air yang bersih, sehat dan produktif dan pada saat yang sama melakukan upaya konservasi kekayaan kehati yang merupakan kekayaan lokal, nasional dan global melalui upaya-upaya kerjasama antar pemerintah dan masyarakat. Hibah ini dilaksanakan bersama-sama dengan pinjaman *Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program* yang berasal dari ADB.

Kinerja Pelaksanaan

Sampai dengan Triwulan IV TA 2012, realisasi penarikan hibah sudah mencapai USD 2,98 juta. Realisasi hibah tersebut berasal dari pelaksanaan pekerjaan oleh konsultan, baik individu maupun perusahaan (*firm*). Realisasi konsultan individu sudah mencapai USD 423,7 ribu sedangkan konsultan perusahaan sudah merealisasikan hibah sebesar USD 2,56 juta. Kontrak konsultan individu maupun konsultan perusahaan baru ditandatangani pada tahun 2012. Jumlah konsultan individu adalah 9 orang. Namun dalam pelaksanaannya hanya ada 7 orang yang dapat dimobilisasi. Dua orang lainnya diganti dengan mengambil kandidat dari ranking berikutnya. Sedangkan untuk konsultan perusahaan, pelaksanaan kegiatan sempat terhenti karena DIPA baru terbit pada bulan Oktober 2012. Sampai saat ini NOL dari ADB untuk pembayaran pengadaan *vehicle and equipment* masih belum terbit. Dari pelaksanaan hibah ini diharapkan bisa dihasilkan survey kehati, pemetaan habitat dan pembangunan sistem GIS (*Geographic Information System*) untuk perbaikan perencanaan dan tindakan pengelolaan KK (kawasan konservasi), serta proyek percontohan restorasi kawasan konservasi.

Rencana Tindak

Pihak pelaksana proyek berkoordinasi dengan ADB terkait dengan penerbitan NOL untuk pengadaan *vehicle and equipment*.

BAB V

Laporan Pelaksanaan Proyek Yang Telah Selesai

5.1. Pinjaman ADB 1964-INO *Sustainable Capacity Building for Decentralization Project*

Tujuan *Sustainable Capacity Building for Decentralization Project (SCB-DP)* adalah untuk mendukung peningkatan kapasitas berkelanjutan pemerintah daerah di 40 kabupaten/kota dan 10 provinsi yang peningkatan kapasitasnya dapat diukur dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimum, mengelola prasarana umum yang sangat penting, mendorong pengembangan ekonomi yang setara dan mengelola program penanggulangan kemiskinan.

Gambaran umum mengenai proyek Pinjaman ADB 1964-INO *Sustainable Capacity Building for Decentralization Project (SCB-DP)* adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 29. Gambaran Umum Pinjaman ADB 1964-INO *Sustainable Capacity Building for Decentralization Project*

Gambaran Umum	
Kode Proyek	1964-INO
Nama Proyek	<i>Sustainable Capacity Building for Decentralization Project</i>
Instansi Penanggungjawab	Kementerian Dalam Negeri
Nilai Pinjaman	USD 42,22 juta
Penandatanganan Pinjaman	5 Juli 2003
Pinjaman Efektif	5 September 2003
Pinjaman Berakhir :	
- <i>Original</i>	30 Juni 2009
- Perpanjangan	31 Desember 2011

Dalam pelaksanaannya, pinjaman ini dibagi menjadi 3 komponen besar yaitu (i) Pengembangan dan Pelaksanaan Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas di lingkungan pemerintah daerah yang menjadi sasaran, (ii) Peningkatan Kapasitas Penyedia Jasa dan (iii) Koordinasi, Manajemen dan Penetapan Standar dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pelaksanaannya, dari 40 kabupaten/kota dan 10 provinsi yang menjadi sasaran awal pelaksanaan proyek hanya terdapat 37 kabupaten/kota dan 7 provinsi yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek. Para peserta proyek ini dibagi dalam 3 batch. Batch 1 terdiri dari 14 kabupaten/kota, sedangkan batch 2 terdiri dari 23 kabupaten/kota. Untuk batch 3 seluruhnya terdiri dari 7 provinsi.

Pengembangan dan pelaksanaan rencana tindak peningkatan kapasitas diwujudkan dalam bentuk penyusunan suatu *Capacity Building Action Plan* (CBAP) di lingkungan pemerintah daerah. Komponen ini merupakan komponen terpenting dalam pelaksanaan pinjaman secara keseluruhan. Dokumen CBAP tersebut merupakan dokumen legal yang mengatur perencanaan kegiatan untuk mendukung peningkatan kapasitas berkelanjutan. Dokumen tersebut memuat dokumen kerangka kebijakan (strategi dan perencanaan program, sasaran kinerja), penguatan kelembagaan (organisasi, hukum dan peraturan), manajemen dan pengembangan sumberdaya manusia, manajemen keuangan serta penganggaran. Penyusunan CBAP ini dibantu oleh tim dan melibatkan seluruh SKPD maupun perwakilan masyarakat dan dijadikan suatu peraturan daerah (Perda).

Tabel 30. Keluaran dari Pengembangan dan Pelaksanaan *Capacity Building Action Plan* (CBAP)

No.	Keluaran	Jumlah
1.	Jumlah peserta kegiatan diklat	87.908 orang
2.	Jumlah peserta kegiatan non-diklat	1.219 buku panduan
3.	Jumlah sistem informasi manajemen (SIM)	221 buah

Dalam pelaksanaannya, proyek SCBD telah melatih sebanyak 87.908 PNS yang mengikuti diklat pelaksanaan CBAP. Pelatihannya mencakup kerangka kelembagaan, penguatan kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, keuangan dan penganggaran serta perencanaan. Untuk pelaksanaan kegiatan non-diklat, telah dihasilkan 1.219 buku panduan/kertas kerja strategis dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah daerah. Untuk mendukung pelaksanaan panduan tersebut sebanyak 1.101 panduan sudah didukung oleh draft peraturan daerah termasuk 133 diantaranya sudah disahkan sebagai peraturan resmi (peraturan daerah atau peraturan gubernur/walikota/bupati). Untuk mendukung pelaksanaannya, telah dikembangkan 221 sistem informasi manajemen (SIM) yang fungsinya untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas sehari-hari. SIM tersebut terdiri dari SIM yang mendukung pelayanan publik seperti tentang Pelayanan Perijinan Terpadu dan Profil Daerah sebanyak 42 buah dan SIM untuk kebutuhan internal seperti tentang Manajemen Personalia, Manajemen Aset dan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 179 buah.

Komponen peningkatan kapasitas penyedia jasa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyedia jasa lokal. Peningkatan ini dilaksanakan melalui suatu kurikulum atau program yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari para penyedia jasa dalam hal pembuatan/perancangan suatu *capacity building action plan*.

Sebanyak 24 kurikulum inti pelatihan telah disertifikasi dan digunakan oleh pemerintah daerah. Pengembangan kurikulum tersebut berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan training of trainers (ToT) di 37 kabupaten/kota dan 7 provinsi diikuti oleh 429 peserta dengan 388 diantaranya

berhasil disertifikasi. Pesertanya berasal dari konsorsium penyedia jasa yang sebagian besar berasal dari universitas. Sedangkan pelatihan bagi manajer pelatihan (training of trainers manager) diikuti oleh 147 peserta yang mendapatkan sertifikasi.

Pelaksanaan koordinasi, manajemen dan penetapan standar pelaksanaan kegiatan diwujudkan melalui dukungan teknologi komunikasi dan informasi (TIK). Dukungan TIK ini diwujudkan melalui pembentukan suatu Pusat Sumberdaya Nasional (*National Resource Center*) yang akan mengelola basis data dari penyedia jasa peningkatan kapasitas dan menyediakan forum sebagai sarana tukar-menukar informasi. Pelaksanaan kegiatan ini termasuk pemasangan komputer, jaringan lokal, website dan pemasangan piranti keras (*hardware*) di 37 kabupaten/kota dan 7 provinsi. Sistem ini dapat digunakan untuk mengakses manual, bahan-bahan pendukung dan sumber lain yang dihasilkan oleh proyek SCBD.

Terdapat beberapa hal yang menghambat pelaksanaan proyek :

1. Terkait dengan manajemen proyek.

Permasalahan yang melingkupi manajemen proyek terkait dengan komunikasi, peranan provinsi dalam proyek, perubahan organisasi dan adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Masalah komunikasi terkait dengan koordinasi antara ADB dan Kemendagri, koordinasi di dalam BP4KN (dewan pengarah proyek) dan antara CPMO, PIU dan penyedia jasa. Sulitnya koordinasi karena luasnya cakupan sasaran proyek yang berada di 37 kabupaten/kota dan 7 provinsi menjadi penyebab sulitnya berkomunikasi. Peranan provinsi disini terkait adanya Badan Pengkajian Peningkatan Kapasitas Daerah (BP2KD) dan Kantor Proyek Koordinator Provinsi yang memiliki peranan sebagai koordinator dari kabupaten/kota peserta proyek. Akan tetapi, tidak adanya anggaran untuk membiayai pelaksanaan membuat kedua institusi tersebut praktis tidak ada. Masalah lainnya yang terkait manajemen proyek adalah adanya perubahan organisasi atau rotasi pejabat maupun staf yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan proyek. Rotasi tersebut tidak dapat dihindari terkait dengan adanya pergantian kepala daerah di kabupaten/kota.

2. Pengadaan

Proses pengadaan dilaksanakan sesuai dengan panduan dan prosedur ADB. Proses persetujuannya membutuhkan *no objection letter* (NOL). Persetujuan tersebut diterbitkan oleh kantor pusat ADB di Manila. Hal ini cukup menghambat persetujuan pengadaan, karena dalam proses pelaksanaannya ada dokumen atau persyaratan yang belum lengkap sedangkan prosesnya selain melewati kantor perwakilan ADB di Indonesia, memerlukan persetujuan dari kantor pusat di Manila. Selain itu, proses pengadaan melibatkan banyak kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia.

3. Jasa konsultan

Jasa konsultan dalam proyek ini dibagi menjadi 4 paket, yaitu tim inti, tim lapangan bagian timur, tim lapangan bagian barat dan audit independen. Fungsi tim inti dan 2 tim lapangan pada dasarnya sama dalam mendukung pekerjaan

manajemen proyek. Tim lapangan dibentuk karena melihat besarnya cakupan geografis pelaksanaan proyek. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, semakin banyaknya tim ini malah membuat koordinasi menjadi terhambat karena dihadapkan pada organisasi yang berbeda, kesenjangan remunerasi dan kesenjangan kualitas/kapasitas di antara tim. Sebaiknya jasa konsultan cukup dibagi 2 saja yaitu tim inti dan audit independen.

4. Pengelolaan pembayaran

Pembayaran dilaksanakan melalui metode pembayaran langsung. Pembayaran dilaksanakan oleh ADB kepada penyedia jasa setelah adanya persetujuan dari PIU daerah, CPMO dan KPKN Jakarta. Sisa tagihan akan dibayarkan oleh pemerintah daerah sebagai porsi dana pendamping. Persetujuan tagihan di PIU daerah ini menemui hambatan terkait dengan kapasitas administrasi penyedia jasa, PIU yang sibuk mengerjakan pekerjaan utamanya dan PIU yang tidak memiliki hubungan baik dengan penyedia jasa serta perubahan organisasi di PIU yang menyebabkan adanya perubahan pemberi otorisasi di daerah.

Secara keseluruhan, proyek dinilai *successfull* untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Hasil survey audit kinerja yang dilaksanakan pada awal dan akhir pelaksanaan proyek menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah yang menjadi peserta menunjukkan peningkatan khususnya di manajemen dan pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan hasil survey kepuasan pelanggan menunjukkan bahwa baik masyarakat maupun pengusaha menjadi lebih puas terhadap layanan yang diberikan pemerintah daerah peserta proyek. Di 19 daerah pengurusan ijin menjadi lebih cepat, murah dan mudah dengan diperkenalkannya Pelayanan Terpadu pengurusan perijinan usaha. Dua belas (12) pemerintah daerah sudah memiliki basis data keluarga miskin yang muktahir dan akurat sehingga mampu menetapkan sasaran program pengurangan kemiskinan dengan efektif. Untuk manajemen aset, terdapat 24 pemerintah daerah yang sudah memiliki Sistem Informasi Manajemen Aset. Selain itu terdapat 16 daerah yang telah memiliki Sistem Informasi Geografis untuk memberikan gambaran lengkap mengenai potensi sumber daya alam di wilayahnya yang bermanfaat bagi calon investor.

Peningkatan cukup signifikan dapat dilihat pula di pemerintah Kabupaten Sragen, Kota Medan dan Provinsi DI Yogyakarta. Daerah-daerah tersebut sudah menerapkan Sistem Pentelenggaraan Pemerintahan Elektronik (e-Government System). Sistem tersebut mencakup (i) otomisasi arus pekerjaan di seluruh unit kerja di dalam dan di luar kabupaten, (ii) sistem manajemen informasi manajemen keuangan, (iii) sistem manajemen sumberdaya manusia, penggajian, (iv) manajemen aset, (v) manajemen kartu penduduk, (vi) sistem informasi hukum dan peraturan, (vii) pengadaan secara elektronik dan (viii) pelayanan terpadu perijinan.

5.2. Pinjaman Jerman No. 2004 66 383 *Improvement of the Dr. Wahidin Sudirohusodo Hospital, Makassar*

Tujuan dari proyek *Improvement of the Dr Wahidin Sudirohusodo Hospital Makassar* adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas jasa layanan kesehatan di rumah sakit. Proyek ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan layanan kesehatan bukan saja di area yang berada di sekitar Rumah Sakit Dr Wahidin Sudirohusodo (RSWS) saja, tetapi juga di wilayah timur Indonesia. Gambaran umum mengenai proyek pinjaman ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 21. Gambaran Umum Pinjaman Jerman No. 2004 66 383
*Improvement of the Dr. Wahidin Sudirohusodo Hospital, Makassar***

Gambaran Umum	
Kode Proyek	2004 66 383
Nama Proyek	Improvement of the Dr. Wahidin Sudirohusodo Hospital, Makassar
Instansi Penanggungjawab	Kementerian Kesehatan
Nilai Pinjaman	EUR 9,0 juta
Penandatanganan Pinjaman	15 Juli 2006
Pinjaman Efektif	24 September 2008
Pinjaman Berakhir	
- <i>Original</i>	15 April 2011
- Perpanjangan	31 Desember 2011

Pelaksanaan proyek dibagi menjadi 3 komponen besar yang terdiri dari infrastruktur, *equipment* (peralatan) dan jasa konsultan. Porsi terbesar pelaksanaan proyek berada di pengadaan peralatan.

**Tabel 22. Rincian Komponen Pinjaman Jerman No. 2004 66 383
*Improvement of the Dr. Wahidin Sudirohusodo Hospital, Makassar***

No.	Komponen	Nilai (Euro)
1.	Infrastructure and Civil Works Improvement	2.235.032
2.	New Hospital Equipment	5.631.515
3.	Consultant	1.083.308
4.	Contingencies	50.145
Total		9.000.000

Komponen *Infrastructure and Civil Works* diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan renovasi bangunan. Pembangunan tersebut berupa *environmental management and conservation* seperti bangunan pengolahan limbah, jaringan pengairan dan reservoir-nya serta fasilitas pengolahan air. Selain itu, terdapat pembangunan pusat kesehatan untuk anak dan ibu serta renovasi bangunan radiologi dan ruangan gawat darurat.

Komponen *New Hospital Equipment* melaksanakan pengadaan peralatan rumah sakit dan peralatan environmental management. Peralatan rumah sakit tersebut terdiri dari CSSD, radiology, COT, ICU, emergency, laundry, paediatrics, health care waste management, lanoratory, cardiology, gastroenterology, neurology, CT scanner, mobile x-ray, speed drill dan electromyogram. Peralatan environmental management mengadakan alat pengolahan sampah dan limbah dari rumah sakit. Proses pembangunan dan pengadaan peralatan selesai seluruhnya pada bulan Desember 2011.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh proyek ini, diantaranya :

1. Terjadinya tender ulang (re-tender) pada beberapa paket proyek sehingga menyebabkan pelaksanaan proyek yang awalnya dijadwalkan selama 4 tahun dan berakhir di bulan April 2011, perlu diperpanjang selama 8 bulan menjadi 31 Desember 2011.
2. Kualitas bangunan yang dihasilkan tidak sesuai dengan persyaratan dari pihak KfW (Jerman) sehingga bangunan tersebut harus disesuaikan, direhabilitasi dan direnovasi agar memenuhi standar yang dipersyaratkan.
3. Rencana pelaksanaan maupun pembiayaan (*project's finance and implementation plan*) tergantung pada pekerjaan rehabilitasi dan renovasi bangunan yang dibiayai oleh rupiah murni (porsi pemerintah Indonesia).
4. Lokasi rumah sakit kurang memadai untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan lahan yang terbatas dan lingkungan sekitar rumah sakit yang padat karena bersebelahan dengan Universitas Hasanuddin Makassar.

Secara umum tujuan dari proyek telah tercapai. Hal tersebut dapat dilihat dari tersedianya dan berfungsinya fasilitas rumah sakit, baik gedung, ruangan dan alat-alat kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya akreditasi dari pemerintahan Indonesia. Selain itu, rumah sakit Wahidin Sudirohusodo memiliki target untuk mendapatkan akreditasi internasional dari *joint commission international*. Beberapa hal yang dapat menjadi *lesson learned* dari pelaksanaan proyek ini diantaranya adalah :

1. Perlu adanya kemampuan berbahasa (Inggris) yang memadai dari panitia lelang. Hal ini untuk menghindari adanya kesalahan intepretasi terkait dengan administrasi pengadaan barang/jasa seperti korespondensi surat menyurat dan dokumen tender yang menggunakan bahasa Inggris.
2. Penafsiran atas *guidelines* pengadaan antara *guidelines* KfW dan pemerintah Indonesia sangat kaku sehingga beberapa proses pengadaan harus ditender ulang karena peserta yang mengajukan penawaran kurang dari 3 peserta, seperti pada pengadaan alat kesehatan. Hal ini menyebabkan bertambahnya waktu pelaksanaan.
3. Adanya perubahan pada alokasi dana pada DIPA, baik penambahan maupun pengurangan alokasi menyebabkan proses pembayaran menjadi terlambat.

BAB VII

Penutup

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan pinjaman luar negeri Triwulan IV TA 2012, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Total nilai pinjaman luar negeri berjumlah USD 24.308,1 juta. Nilai pinjaman tersebut terdiri dari pinjaman program sebesar USD 443,0 juta (1,8%) dan pinjaman proyek sebesar USD 23.865,1 juta (98,2%). Pinjaman proyek tersebut dilaksanakan melalui mekanisme pinjaman lunak (*soft loan*) sebesar USD 17.853,4 juta dan mekanisme kredit ekspor sebesar USD 6.011,7 juta.
2. Penyerapan kumulatif pinjaman luar negeri sampai dengan Triwulan IV TA 2012 mencapai 44,3% dari seluruh nilai pinjaman luar negeri, sedangkan penyerapan berdasarkan tahun anggaran berjalan mencapai 53,9% dari target tahun anggaran. Realisasi penyerapan kumulatif untuk pinjaman program sampai dengan Triwulan IV TA 2012 mencapai 90,7% dengan penarikan pada TA 2012 mencapai 90,7%. Sedangkan realisasi penarikan kumulatif untuk pinjaman proyek mencapai 43,5% dari target dan penarikan pada TA 2012 mencapai 49,7%.
3. Realisasi penyerapan kumulatif tertinggi terhadap nilai total pinjaman proyek berdasarkan sumber pinjaman secara berturut-turut adalah ADB (59,2%), Bank Dunia (52,6%), JICA (50,5%) dan Bilateral Lain (50,3%). Sedangkan realisasi penyerapan tertinggi terhadap target tahunan pinjaman proyek adalah ADB (71,6%), Bilateral Lain (67,2%), Bank Dunia (58,1%) dan IDB (57,4%).
4. Realisasi penyerapan kumulatif tertinggi terhadap nilai total pinjaman proyek untuk 6 (enam) instansi penanggungjawab yang memiliki nilai pinjaman terbesar secara berturut-turut adalah Kementerian Dalam Negeri (91,0%), Kementerian Pekerjaan Umum (55,6%), PT. PLN (47,8%), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (43,0%), Kementerian Perhubungan (28,1%) dan Kementerian Pertahanan (16,3%). Sedangkan realisasi penyerapan tertinggi terhadap target tahunan pinjaman proyek adalah Kementerian Pekerjaan Umum (69,6%), Kementerian Dalam Negeri (67,6%), PT. PLN (58,1%), Kementerian Perhubungan (47,7%), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (47,3%) dan Kementerian Pertahanan (29,4%).
5. Pada Triwulan IV TA 2012 terdapat 58 pinjaman proyek yang memiliki nilai progres varian ≤ -30 . Progres varian adalah selisih antara persentase penarikan kumulatif dengan persentase waktu terpakai sejak pinjaman tersebut efektif.

Angka progres varian yang semakin kecil dari minus 30 mengindikasikan bahwa suatu proyek mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan (*serious delay*).

6. Pada edisi Triwulan IV TA 2012 ini dibahas 4 proyek hibah yang terdiri atas proyek hibah Bank Dunia *Support to BPK for Preparation of New Strategic Plan Project*, hibah Bank Dunia *Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)* dan *Extending Telecommunication in Rural Indonesia* dan hibah ADB *Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program-Citarum Watershed Management and Biodiversity Conservation*.
7. Penyelesaian *Project Completion Report* adalah 6 bulan setelah proyek tersebut berakhir masa lakunya. Pada edisi Triwulan IV TA 2012 dibahas 2 laporan yaitu proyek pinjaman ADB *Sustainable Capacity Building for Decentralization Project (SCB-DP)* yang dikategorikan *successfull* dan pinjaman Jerman No.2004 66 383 *Improvement of the Dr. Wahidin Sudirohusodo Hospital, Makassar* yang tujuan dari proyek dinilai telah tercapai.

7.2. Saran

Upaya dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Untuk pinjaman-pinjaman proyek yang terlambat pelaksanaannya dan sudah mendekati masa *closing date* di tahun 2013 perlu dilakukan percepatan pelaksanaan. Langkah-langkah lain yang dapat dipertimbangkan untuk dilakukan diantaranya memproses pembatalan sebagian dana pinjaman pada kegiatan-kegiatan yang diperkirakan tidak akan selesai maupun melaksanakan *re-scoping* kegiatan. Selain itu, apabila mendesak dan memang diperlukan pihak penanggungjawab pinjaman dapat memproses usulan perpanjangan *closing date* dengan berbagai pertimbangan yang tepat.
2. Perlu adanya rekonsiliasi data keuangan secara rutin dan mendorong instansi penanggung jawab pelaksana proyek pinjaman luar negeri untuk melengkapi seluruh persyaratan administrasi keuangan dalam pengajuan pembayaran agar tidak terjadi *irregularities* dan dapat menurunkan angka *backlog*. Selain itu, perlu adanya penyusunan *disbursement plan* atau rencana penyerapan yang baik sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi kekurangan atau kelebihan alokasi dana, yang menyebabkan perlu adanya revisi dokumen anggaran (DIPA) dan berpotensi menghambat pelaksanaan proyek.
3. Meningkatkan kerjasama dengan *development partners* untuk mengintensifkan *joint monitoring* melalui pelaksanaan *review mission* maupun rapat bersama yang tidak hanya melibatkan instansi penanggungjawab namun juga stakeholders lainnya (Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia dan BPKP).

DAFTAR ISTILAH

ADB	: Asian Development Bank
Backlog	: Penggunaan dana talangan pemerintah dalam rangka penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri melalui mekanisme Rekening Khusus yang belum dimintakan dan/atau belum mendapatkan penggantian dan/atau tidak mendapatkan penggantian dari pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri
CPMU	: Central Project Management Unit
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
FKE	: Fasilitas Kredit Ekspor
IBRD	: International Bank for Reconstruction and Development
ICR	: Implementation Completion Report
IDB	: Islamic Development Bank
IFAD	: International Fund for Agricultural Development
JBIC	: Japan Bank for International Cooperation
JICA	: Japan International Cooperation Agency
NOL	: No Objection Letter; persetujuan dari kreditor
P/Q	: Pre Qualification; tahap dalam proses pengadaan barang/jasa untuk menentukan perusahaan yang akan ikut dalam proses lelang
PCR	: Project Completion Report; laporan yang dibuat ketika suatu proyek pinjaman telah selesai
Progress Varian	: Perbandingan (selisih) antara persentase realisasi penyerapan dana dibandingkan dengan persentase waktu pelaksanaannya
SLA	: Subsidiary Loan Agreement; perjanjian penerusan pinjaman kepada BUMN/BUMD /pemerintah daerah